BAGIAN ANGGARAN 093

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2025

(Audited)

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta 12950
Telepon (62-21) 2557 8300, Faks (62-21) 528 92456, http://www.kpk.go.id

KATA PENGANTAR

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah salah satu Lembaga Negara yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan disertai Catatan atas Laporan Keuangan. Hal ini sesuai amanat Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Penyusunan laporan keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun Anggaran 2025 ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada KPK. Disamping itu laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 8 Mei 2026
Sekretaris Jenderal
Komisi Pemberantasan Korupsi,

Cahya H. Harefa
NIP 197005112021061001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR LAMPIRAN iv
DAFTAR GAMBAR v
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB 1
RINGKASAN 2
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN 4
II. NERACA 5
III. LAPORAN OPERASIONAL 6
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 7
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 8
A. PENJELASAN UMUM 8
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN 16
B.1. PENDAPATAN 17
B.2. BELANJA 19
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA 24
C.1. ASET LANCAR 24
C.2. ASET TETAP 27
C.3. PIUTANG JANGKA PANJANG 32
C.4. ASET LAINNYA 32
C.5. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 35
C.6. EKUITAS 35
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL 36
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 43
F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA 45

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 Target Renstra KPK 2025-2029 9
Tabel 2 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap 12
Tabel 3 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud 13
Tabel 4 Penggolongan Kualitas Piutang 14
Tabel 5 Anggaran KPK TA 2025 per Program 16
Tabel 6 Anggaran KPK TA 2025 per Jenis Belanja 16
Tabel 7 Rincian Realisasi Pendapatan TA 2025 17
Tabel 8 Rincian Realisasi PNBP Fungsional TA 2025 dan 2024 18
Tabel 9 Rincian Realisasi PNBP Umum TA 2025 dan 2024 18
Tabel 10 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program TA 2025 19
Tabel 11 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025 berdasarkan Sumber Dana 20
Tabel 12 Perbandingan Realisasi TA 2025 dan 2024 21
Tabel 13 Pengembalian Belanja TA 2025 21
Tabel 14 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan TA 2024 22
Tabel 15 Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2025 dan 2024 22
Tabel 16 Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024 23
Tabel 17 Rincian Piutang Bukan Pajak Per Akun per 31 Desember 2025 dan 2024 24
Tabel 18 Rincian Jenis Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 26
Tabel 19 Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 27
Tabel 20 Rincian Nilai Tanah per 31 Desember 2025 dan 2024 28
Tabel 21 Rincian Mutasi Tanah per 31 Desember 2025 28
Tabel 22 Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 28
Tabel 23 Rincian per Jenis Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 29
Tabel 24 Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 29
Tabel 25 Rincian per Jenis Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 30
Tabel 26 Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 30
Tabel 27 Rincian per Jenis Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 30
Tabel 28 Rincian per Aset Tetap dalam Renovasi 31
Tabel 29 Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 31
Tabel 30 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 31
Tabel 31 Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 32
Tabel 32 Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 32
Tabel 33 Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 33
Tabel 34 Rincian Mutasi Aset tak Berwujud dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 33
Tabel 35 Rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 34
Tabel 36 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 34
Tabel 37 Rincian Pendapatan PNBP-LO 31 Desember 2025 dan 2024 36
Tabel 38 Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2025 dan 2024 38
Tabel 39 Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 38
Tabel 40 Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2025 dan 2024 39
Tabel 41 Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2025 dan 2024 39
Tabel 42 Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2025 dan 2024 40
Tabel 43 Rincian Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat 31 Desember 2025 dan 2024 40
Tabel 44 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2025 dan 2024 41
Tabel 45 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 31 Desember 2025 dan 2024 41
Tabel 46 Rincian Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional 42
Tabel 47 Rincian Surplus (Defisit) LO pada 31 Desember 2025 dan 2024 43
Tabel 48 Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2025 dan 2024 44
Tabel 49 Rincian Uang di Pengelola Titipan uang Sitaan dan Gratifikasi 46
Tabel 50 Rincian Denda Per 31 Desember 2025 47
Tabel 51 Capaian Output untuk masing-masing Rincian Output (RO) 50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Neraca Percobaan Kas dan Akrual, Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) per 31 Desember 2025
Lampiran 2	Rincian Kas Lainnya di Bendahara per 31 Desember 2025
Lampiran 3	Rincian Saldo Denda dan Piutang Uang Pengganti Biaya Perkara dan Uang Gratifikasi per 31 Desember 2025.
Lampiran 4	Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025
Lampiran 5	Rincian Piutang TGR Non Bendahara per 31 Desember 2025
Lampiran 6	Rincian Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025
Lampiran 7	Laporan Posisi Persediaan per 31 Desember 2025
Lampiran 8	Barang Rampasan yang Menjadi Kompensasi Uang Pengganti per 31 Desember 2025
Lampiran 9	Daftar Barang Rampasan yang Dimanfaatkan Oleh Pihak Lain per 31 Desember 2025
Lampiran 10	Laporan Posisi Barang Milik Negara per 31 Desember 2025
Lampiran 11	Laporan Penyusutan Barang Milik Negara per 31 Desember 2025
Lampiran 12	Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025
Lampiran 13	Rincian Pendapatan Sewa Diterima Dimuka per 31 Desember 2025
Lampiran 14	Barang Gratifikasi Belum Diserahkan ke Kementerian Keuangan s.d. 31 Desember 2025
Lampiran 15	Barang Gratifikasi Belum Diserahkan Pelapor s.d. 31 Desember 2025
Lampiran 16	Rincian Rekening Pemerintah yang dimiliki KPK per 31 Desember 2025
Lampiran 17	Data Gugatan Hukum kepada KPK per 31 Desember 2025
Lampiran 18	Daftar Barang Sitaan yang Berada dalam Pengelolaan KPK per 31 Desember 2025
Lampiran 19	Daftar Barang Sita Eksekusi yang Belum Dilakukan Penilaian per 31 Desember 2025
Lampiran 20	Daftar Pengadaan Barang/Jasa di Rekening Penampungan TA 2025

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1 Kerangka Pemikiran Renstra KPK 2025-2029 9
Gambar 2 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025 20

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 *(Audited)* sebagaimana terlampir, merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 8 Mei 2026
Pimpinan,

Setyo Budiyanto
Ketua

Jalan Kuningan Persada Kav.4, Setiabudi, Jakarta 12950
Telepon (021) 25578300, Faksimile (021) 25578333, (021) 52892456 http://www.kpk.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun Anggaran 2025, berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Pemerintahan dan peraturan terkait lainnya. Semua informasi yang dimuat dalam Laporan Keuangan adalah penyajian manajemen Komisi Pemberantasan Korupsi.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Jakarta, 11 Februari 2025

Inspektur,

Subroto, Ak. MM.
Akuntan Reg. Neg : D – 14184

NOTA KESEPAKATAN ANGKA ASERSI FINAL

LAPORAN KEUANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) (BA093) TAHUN 2025

Nomor: NKF-10/093/PB.06/2026

Pada hari **Selasa, 05 Mei 2026**, telah dilaksanakan **Rekonsiliasi Tiga Pihak** yang menyepakati angka-angka sebagaimana Lampiran Nota Kesepakatan ini. **KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) (BA 093)** akan menyusun dan menyampaikan asersi final Laporan Keuangan Tahun 2025 secara lengkap kepada Ditjen Perbendaharaan dan menyampaikan Laporan BMN kepada Ditjen Kekayaan Negara **paling lambat tanggal 08 Mei 2026.**

PARA PIHAK YANG MENYEPAKATI

No	Nama	Unit Instansi
1	Mohamad Ibnussoim, Kepala Bagian Verifikasi, Akuntansi, dan Pelaporan Keuangan	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) – selaku Penyusun LKKL
2	Emirenciana Nyantyasningsih, Kepala Subdirektorat Perumusan Kebijakan Barang Milik Negara I	DJKN – selaku Penyusun LBMN
3	Joko Supriyanto, Kepala Subdirektorat Bimbingan Akuntansi Instansi dan Bendahara Umum Negara	DJPb – selaku Penyusun LKPP
4	Rosalin Boru Angin, Pengendali Teknis Pemeriksaan	BPK RI - selaku Auditor BPK K/L

RINGKASAN

Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun Anggaran 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan TA 2025 berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp527.230.342.935,00 atau mencapai 328,57% dari target PNBP TA 2025 sebesar Rp160.460.567.000,00.

Realisasi Belanja TA 2025 adalah sebesar Rp1.387.864.616.458,00 atau mencapai 94,76% dari alokasi anggaran sebesar Rp1.464.548.473.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025.

Nilai Aset dicatat dan disajikan sebesar Rp6.020.851.267.169,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp3.698.200.093.474,00, Aset Tetap (neto) sebesar Rp2.267.489.890.383,00, Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp65.542.081,00, dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp55.095.741.231,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp260.137.113.023,00 dan Rp5.760.714.154.146,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan LO, Beban, dan Surplus/Defisit Operasional atas kegiatan operasional dan kegiatan non operasional. Pendapatan LO dari Kegiatan Operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.629.780.474.085,00, sedangkan jumlah Beban dari Kegiatan Operasional adalah sebesar Rp1.673.448.165.237,00 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp43.667.691.152,00. Dengan mempertimbangkan defisit Kegiatan Non Operasional sebesar Rp22.311.208.810,00 maka entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp65.978.899.962,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp5.330.184.569.343,00. Sampai tanggal 31 Desember 2025, terdapat kenaikan ekuitas senilai Rp430.529.584.803,00 sehingga Ekuitas akhir adalah senilai Rp5.760.714.154.146,00.

Perubahan ekuitas senilai Rp430.529.584.803,00 dipengaruhi oleh Defisit-LO sebesar Rp65.978.899.962,00, koreksi yang mengurangi ekuitas senilai Rp346.420.767.692,00, serta adanya penambahan ekuitas dari transaksi antar entitas senilai Rp842.929.252.457,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual. Neraca Percobaan, LRA, LO, LPE, dan Neraca secara detail dapat dilihat pada **lampiran 1.**

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2025			TA 2024
		Anggaran	Realisasi	% Real. Angg.	Realisasi
1	2	3	4	5	6
PENDAPATAN	**B.1**				
Penerimaan Negara Bukan Pajak		160.460.567.000,00	527.230.342.935,00	328,57	493.649.960.403,00
JUMLAH PENDAPATAN		**160.460.567.000,00**	**527.230.342.935,00**	**328,57**	**493.649.960.403,00**
BELANJA	**B.2**				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.2.1	1.051.586.681.000,00	1.048.117.501.162,00	99,67	891.885.016.911,00
Belanja Barang	B.2.2	401.171.690.000,00	329.051.328.600,00	82,02	434.193.278.741,00
Jumlah Belanja Operasi		**1.452.758.371.000,00**	**1.377.168.829.762,00**	**94,80**	**1.326.078.295.652,00**
Belanja Modal	B.2.3				
Belanja Tanah		-	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin		8.868.968.000,00	8.349.539.011,00	94,14	16.225.254.559,00
Belanja Gedung dan Bangunan		1.460.995.000,00	1.426.050.293,00	97,61	4.514.493.150,00
Belanja Modal Lainnya		1.460.139.000,00	920.197.392,00	63,02	6.761.610.703,00
Jumlah Belanja Modal		**11.790.102.000,00**	**10.695.786.696,00**	**90,72**	**27.501.358.412,00**
JUMLAH BELANJA		**1.464.548.473.000,00**	**1.387.864.616.458,00**	**94,76**	**1.353.579.654.064,00**

Jakarta, 8 Mei 2026
Pimpinan,

Setyo Budiyanto
Ketua

II. NERACA

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

Nama Perkiraan	Catatan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
ASET			
Aset Lancar	**C.1**		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	500.000.000,00	500.000.000,00
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.2	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	C.1.3	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	C.1.4	46.810.161.496,00	92.461.036.292,00
Piutang Bukan Pajak	C.1.5	1.880.456.367.834,00	1.798.060.019.090,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	C.1.6	(86.776.696.980,00)	(48.272.351.472,00)
Piutang Bukan Pajak (Netto)		1.793.679.670.854,00	1.749.787.667.618,00
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	C.1.7	226.216.708,00	131.477.508,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar TP/TGR	C.1.8	(1.131.084,00)	(657.388,00)
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (Netto)		225.085.624,00	130.820.120,00
Belanja Dibayar Di Muka	C.1.9	7.243.428.793,00	8.877.291.319,00
Persediaan	C.1.10	1.849.741.746.707,00	1.365.667.525.291,00
Jumlah Aset Lancar		**3.698.200.093.474,00**	**3.217.424.340.640,00**
Aset Tetap	**C.2**		
Tanah	C.2.1	1.740.714.091.375,00	1.740.714.091.375,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2	747.362.788.134,00	797.342.361.977,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3	486.523.552.885,00	485.147.380.592,00
Jalan. Irigasi. dan Jaringan	C.2.4	128.816.422.987,00	129.449.501.499,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	3.769.603.128,00	3.824.511.498,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset tetap	C.2.7	(839.696.568.126,00)	(811.378.004.516,00)
Jumlah Aset Tetap		**2.267.489.890.383,00**	**2.345.099.842.425,00**
Piutang Jangka Panjang	**C.3**		
Piutang Tagihan TP/TGR	C.3.1	65.871.437,00	98.097.071,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih -Tagihan TP/TGR	C.3.2	(329.356,00)	(490.485,00)
Jumlah Piutang Jangka Panjang		**65.542.081,00**	**97.606.586,00**
Aset Lainnya	**C.4**		
Aset Tak Berwujud	C.4.1	124.844.646.165,00	141.832.293.426,00
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.4.2	-	-
Dana di Rekening Penampungan-K/L	C.4.3	22.799.441.822,00	20.965.977.951,00
Aset Lain-lain	C.4.4	88.997.808.287,00	40.527.293.276,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4.5	(181.546.155.043,00)	(131.821.799.597,00)
Jumlah Aset Lainnya		**55.095.741.231,00**	**71.503.765.056,00**
JUMLAH ASET		**6.020.851.267.169,00**	**5.634.125.554.707,00**
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	**C.5**		
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.5.1	259.490.382.453,00	303.279.304.003,00
Utang yang belum ditagihkan	C.5.2	-	-
Uang Muka Dari KPPN	C.5.3	500.000.000,00	500.000.000,00
Pendapatan Diterima Dimuka	C.5.4	146.730.570,00	161.681.361,00
Hibah Langsung yang belum disahkan	C.5.5	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.5.6	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**260.137.113.023,00**	**303.940.985.364,00**
JUMLAH KEWAJIBAN		**260.137.113.023,00**	**303.940.985.364,00**
EKUITAS	**C.6**		
Ekuitas		5.760.714.154.146,00	5.330.184.569.343,00
JUMLAH EKUITAS		**5.760.714.154.146,00**	**5.330.184.569.343,00**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**6.020.851.267.169,00**	**5.634.125.554.707,00**

Jakarta, 8 Mei 2026
Pimpinan,

Setyo Budiyanto
Ketua

III. LAPORAN OPERASIONAL

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik (Turun) %
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN OPERASIONAL				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	1.629.780.474.085,00	1.773.973.427.802,00	(8,13)
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		**1.629.780.474.085,00**	**1.773.973.427.802,00**	**(8,13)**
BEBAN OPERASIONAL				
Beban Pegawai	D.2	932.385.646.263,00	1.005.813.733.000,00	(7,30)
Beban Persediaan	D.3	3.010.168.773,00	4.050.112.401,00	(25,68)
Beban Barang dan Jasa	D.4	231.288.138.376,00	250.305.371.426,00	(7,60)
Beban Pemeliharaan	D.5	58.279.990.911,00	46.411.572.760,00	25,57
Beban Perjalanan Dinas	D.6	68.411.364.355,00	129.476.868.942,00	(47,16)
Beban Barang untuk Diserahkan kpd Masyarakat	D.7	237.498.584.048,00	191.056.046.439,00	24,31
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	102.385.014.704,00	108.178.480.005,00	(5,36)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9	40.189.257.807,00	37.314.101.041,00	7,71
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		**1.673.448.165.237,00**	**1.772.606.286.014,00**	**(5,59)**
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(43.667.691.152,00)	1.367.141.788,00	(3.294,09)
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.10	947.028.000,00	413.897.199,00	128,81
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.10	12.068.934.181,00	987.801.648,00	1.121,80
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		**(11.121.906.181,00)**	**(573.904.449,00)**	**1.837,94**
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA				
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10	1.762.772.382,00	16.555.560.258,00	(89,35)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10	12.952.075.011,00	10.002.998.830,00	29,48
Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		**(11.189.302.629,00)**	**6.552.561.428,00**	**(270,76)**
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(22.311.208.810,00)	5.978.656.979,00	(473,18)
SURPLUS / (DEFISIT) - LO		(65.978.899.962,00)	7.345.798.767,00	(998,19)

Jakarta, 8 Mei 2026
Pimpinan,

Setyo Budiyanto
Ketua

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
EKUITAS AWAL	E.1	**5.330.184.569.343,00**	**4.744.670.714.755,00**
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	**(65.978.899.962,00)**	**7.345.798.767,00**
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR			
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS			
Penyesuaian Nilai Aset	E.3	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.4	(6.409.316.000,00)	(5.403.302.919,00)
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	E.5	-	-
Revaluasi Aset Tetap	E.6	-	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.7	325.387.051,00	-
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	E.8	438.209.090,00	(12.470.040,00)
Koreksi Lainnya	E.9	(340.775.047.833,00)	(156.709.143.757,00)
JUMLAH		**(346.420.767.692,00)**	**(162.124.916.716,00)**
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.10	**842.929.252.457,00**	**740.292.972.537,00**
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		**430.529.584.803,00**	**585.513.854.588,00**
EKUITAS AKHIR	E.11	**5.760.714.154.146,00**	**5.330.184.569.343,00**

Jakarta, 8 Mei 2026
Pimpinan,

Setyo Budiyanto
Ketua

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. PROFIL DAN RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk sebagai lembaga negara yang bersifat independen dan dalam melaksanakan tugas serta kewenangannya bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah landasan legal bagi pelaksanaan tugas KPK dalam mengkoordinasikan lembaga penegak hukum lainnya melalui koordinasi dan supervisi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (*repressive*), mendorong pencegahan (*preventive*) tindak pidana korupsi, serta melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. KPK saat ini dipimpin oleh Pimpinan KPK yang terdiri atas lima orang, seorang ketua merangkap anggota dan empat orang anggota. Kelima pimpinan KPK tersebut merupakan pejabat negara, yang berasal dari unsur pemerintahan dan unsur masyarakat. Pimpinan KPK memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Dalam pengambilan keputusan, pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial.

Rencana Strategis

KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, tugas KPK meliputi: melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, melakukan koordinasi dan supervisi terhadap upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berwenang, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Rencana strategis di KPK disusun setiap lima tahun sekali. Pada saat Laporan Keuangan ini disusun, Renstra 2025-2029 telah selesai disusun dan telah dilakukan harmonisasi dengan Kementerian Hukum untuk selanjutnya akan ditetapkan.

Visi

"Mewujudkan Negara Antikorupsi Menuju Indonesia Emas 2045".

Misi

1. Mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang antikorupsi.
2. Memperkokoh Integritas dan kesadaran antikorupsi.
3. Penanganan perkara korupsi yang memprioritaskan pemulihan aset.
4. Memperkuat kelembagaan KPK.

Sasaran Strategis

Sasaran Strategis merupakan kondisi yang akan dicapai KPK secara nyata yang mencerminkan adanya dampak atas pelaksanaan Program. Selain berbasis hasil evaluasi capaian Renstra 2020-2024, penyusunan Sasaran Strategis memperhatikan amanat atau penugasan RPJMN 2025-2029. Berdasarkan Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029, KPK diamanatkan sebagai koordinator pencapaian indikator Program Prioritas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan sasaran "Terwujudnya Sistem Antikorupsi dan Anti Pencucian Uang yang Efektif serta Sistematis". Berkenaan dengan hal tersebut, KPK mengoordinasikan pencapaian indikator program prioritas sebagai berikut.

1. Indeks Integritas Nasional, dengan target 2025 (74,52) – 2029 (77,57).

2. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK), dengan target 2025 (3,97) – 2029 (4,06).

Memperhatikan RPJMN 2025-2029, Visi, Misi, dan Tujuan KPK, maka ditetapkan 4 (empat) Sasaran Strategis KPK sebagai berikut:

1) Terwujudnya sistem integritas dan pencegahan korupsi pada tata kelola pemerintahan.
2) Menguatnya sikap dan perilaku masyarakat yang antikorupsi.
3) Menguatnya penegakan hukum tindak pidana korupsi.
4) Terwujudnya tata kelola kelembagaan KPK yang akuntabel, kolaboratif, transformatif, dan berintegritas.

Target yang diharapkan pada akhir masa pelaksanaan Renstra adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Target Renstra KPK 2025-2029

SASARAN STRATEGIS	SATUAN SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TARGET TAHUN:				
			2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya Sistem Integritas dan Pencegahan Korupsi pada Tata Kelola Pemerintahan **(SS 1)**	Indeks Integritas Nasional ***(Indikator SS 1.1)***	Indeks	74,52	-	76,04	-	77,57
Menguatnya Sikap dan Perilaku Masyarakat yang Antikorupsi **(SS 2)**	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) ***(Indikator SS 2.1)***	Indeks	3,97	3,99	4,02	4,04	4,06
Menguatnya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi **(SS 3)**	Persentase Asset Recovery ***(Indikator SS 3.1)***	%	70	70	70	70	70
Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan KPK yang Akuntabel, Kolaboratif, Transformatif, dan Berintegritas **(SS 4)**	Indeks Reformasi Birokrasi KPK ***(Indikator SS 4.1)***	Indeks	81	84	87	90	93

Adapun kerangka pemikiran rencana strategis KPK 2025-2029 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1 Kerangka Pemikiran Renstra KPK 2025-2029

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

A.3. BASIS AKUNTANSI

Komisi Pemberantasan Korupsi menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan KPK dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. KPK telah menerbitkan Keputusan Sekretaris Jenderal KPK Nomor 1420/KU.03.00/50/05/2025 tanggal 7 Mei 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Komisi Pemberantasan Korupsi. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan LK KPK adalah sebagai berikut:

1. **Pendapatan-LRA**
   - Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
   - Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
   - Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
2. **Pendapatan-LO**

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

3. Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
  Piutang Uang Pengganti, dan Biaya Perkara diakui pada saat terbit Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (SP4).
  Piutang Gratifikasi diakui pada saat terbit Keputusan Pimpinan KPK Tentang Penetapan Status Gratifikasi.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR. Piutang Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) diakui pada saat terbitnya Surat Keputusan Pembebanan TP/TGR dan/atau telah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - Harga pembelian apabila diperoleh dengan pembelian;
  - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin atau aset tetap renovasi peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  2) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan atau aset tetap renovasi gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  3) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian;
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Untuk BMN yang mempunyai nilai Aset Tetap di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana tersebut di atas dicatat di dalam buku inventaris di luar pembukuan (ekstrakomptabel). Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  a. Tanah
  b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
  c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 266/KM.6/2023 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum penggolongan masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

KELOMPOK ASET TETAP	MASA MANFAAT
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun

Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud (ATB), dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat ATB ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 240/KM.6/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

(SUB-SUB) KELOMPOK ATB	MASA MANFAAT (TAHUN)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
- Untuk penambahan masa manfaat aset tak berwujud, KPK telah menetapkan kebijakan akuntansi melalui:
  - Keputusan Sekretaris Jenderal KPK Nomor 1420/KU.03.00/50/05/2025 tanggal 7 Mei 2025 tentang Kebijakan Akuntansi KPK yang mengatur amortisasi pengembangan ATB dan

- Keputusan Kuasa Pengguna Barang Nomor 2174/PL.09/50/11/2025 tanggal 28 November 2025 tentang Penambahan Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud yang Berasal dari Pengembangan di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi

6. Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. **Kewajiban Jangka Pendek**

- Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Uang Muka dari KPPN dan Pendapatan Diterima di muka.

b. **Kewajiban Jangka Panjang**

- Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

7. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

8. Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Tabel 4 Penggolongan Kualitas Piutang

KUALITAS PIUTANG	URAIAN	PENYISIHAN
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Karena kekhasan jenis piutang KPK, maka kebijakan penggolongan kualitas piutang di KPK adalah:

a. Piutang Gratifikasi
   Piutang gratifikasi dikategorikan lancar dan macet. Piutang gratifikasi dikategorikan lancar sebelum piutang tersebut diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan disisihkan sebesar 0,5%. Piutang gratifikasi dikategorikan macet jika telah diserahkan ke PUPN dan disisihkan sebesar 100%.
b. Piutang Uang Pengganti
   Piutang uang pengganti dikategorikan lancar dan macet. Piutang uang pengganti dikategorikan lancar dan disisihkan sebesar 0,5%, jika:
   1. Para terpidana mengangsur pembayaran Uang Pengganti, atau,
   2. Para terpidana masih/sedang menjalani pidana penjara, baik pidana pokok maupun pidana tambahan sebagai subsider pembayaran uang pengganti.

   Piutang uang pengganti dikategorikan macet dan disisihkan sebesar 100%, jika para terpidana telah menjalani pidana penjara, baik pidana pokok maupun pidana tambahan sebagai subsider pembayaran uang pengganti.

9. Kebijakan Akuntansi Terkait Perolehan Aset Tetap dari Belanja Barang untuk Kegiatan yang Bersifat Rahasia

Khusus pembelian alat-alat untuk kegiatan yang bersifat rahasia, yang dimaksudkan sebagai barang habis pakai, tidak untuk dipelihara, dan bukan untuk operasional KPK sehari-hari, maka atas pembelian tersebut dikategorikan sebagai belanja barang.

10. Kebijakan Akuntansi Terkait Kontrak-kontrak Konstruksi

Kontrak-kontrak konstruksi dicatat sebagai aset sesuai dengan prestasi fisik pengerjaan pada tanggal periode pelaporan keuangan, bukan berdasarkan nilai pembayaran yang telah diterima oleh pihak vendor. Selisih nilai pembayaran dengan prestasi fisik akan dikembalikan melalui Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) ke Kas Negara dan dicatat sebagai piutang.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, KPK telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan alokasi belanja yang disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan anggaran berdasarkan program di KPK adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Anggaran KPK TA 2025 per Program

PROGRAM	ANGGARAN TA 2025	
	AWAL	SETELAH REVISI
Anggaran Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	160.460.567.000,00	160.460.567.000,00
Anggaran Belanja Rupiah Murni		
Program Pencegahan dan Penindakan Perkara Korupsi	279.765.372.000,00	250.163.496.000,00
Program Dukungan Manajemen	957.675.954.000,00	1.188.950.201.000,00
Jumlah Belanja Rupiah Murni	**1.237.441.326.000,00**	**1.439.113.697.000,00**
Anggaran Belanja PNBP		
Program Pencegahan dan Penindakan Perkara Korupsi	-	8.393.044.000,00
Program Dukungan Manajemen	-	17.041.732.000,00
Jumlah Belanja PNBP	**-**	**25.434.776.000,00**
Anggaran Belanja Keseluruhan		
Program Pencegahan dan Penindakan Perkara Korupsi	279.765.372.000,00	258.556.540.000,00
Program Dukungan Manajemen	957.675.954.000,00	1.205.991.933.000,00
Jumlah Anggaran Belanja	**1.237.441.326.000,00**	**1.464.548.473.000,00**

Rincian anggaran berdasarkan jenis pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Anggaran KPK TA 2025 per Jenis Belanja

URAIAN	ANGGARAN TA 2025	
	AWAL	SETELAH REVISI
Anggaran Pendapatan		
- Penerimaan Negara Bukan Pajak	160.460.567.000,00	160.460.567.000,00
Anggaran Belanja Rupiah Murni		
- Belanja Pegawai	790.709.181.000,00	1.051.586.681.000,00
- Belanja Barang	428.011.540.000,00	376.191.860.000,00
- Belanja Modal	18.720.605.000,00	11.335.156.000,00
Jumlah Belanja Rupiah Murni	**1.237.441.326.000,00**	**1.439.113.697.000,00**
Anggaran Belanja PNBP		
- Belanja Pegawai	-	-
- Belanja Barang	-	24.979.830.000,00
- Belanja Modal	-	454.946.000,00
Jumlah Belanja PNBP	**-**	**25.434.776.000,00**
Anggaran Belanja Keseluruhan		
- Belanja Pegawai	790.709.181.000,00	1.051.586.681.000,00
- Belanja Barang	428.011.540.000,00	401.171.690.000,00
- Belanja Modal	18.720.605.000,00	11.790.102.000,00
Jumlah Anggaran Belanja	**1.237.441.326.000,00**	**1.464.548.473.000,00**

B.1. PENDAPATAN

Realisasi PNBP Rp527.230.342.935,00

Realisasi PNBP KPK TA 2025 adalah sebesar Rp527.230.342.935,00. Dengan memperhitungkan target Pendapatan KPK TA 2025 adalah sebesar Rp160.460.567.000,00, maka realisasi pendapatan PNBP tersebut adalah 328,57% terhadap target pendapatan.

Rincian Realisasi PNBP KPK sampai dengan tanggal pelaporan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 7 Rincian Realisasi Pendapatan TA 2025

No	Jenis Pendapatan	Realisasi
1	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	947.028.000,00
2	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	174.341.360,00
3	Pendapatan Ongkos Perkara	1.284.000,00
4	Pendapatan Gratifikasi yang Ditetapkan KPK Menjadi Milik Negara	4.709.356.338,00
5	Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	76.662.549.056,00
6	Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	364.251.250,00
7	Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	353.641.798.870,00
8	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Pencucian Uang	43.345.623.916,00
9	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Korupsi	18.271.933.264,00
10	Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Korupsi	17.219.202.469,00
11	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	9.142.936.522,00
12	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	350.637.904,00
13	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	630.179.636,00
14	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	2.092.630,00
15	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	1.360.896.136,00
16	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	3.445.953,00
17	Pendapatan Anggaran Lain-lain	59.810.993,00
18	Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang	341.490.178,00
19	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non-TP/TGR Pensiunan PNS	1.484.460,00
TOTAL PENDAPATAN		527.230.342.935,00

Realisasi PNBP sebesar Rp527.230.342.935,00 tersebut terdiri atas:

- **Realisasi PNBP Fungsional sebesar Rp523.700.425.863,00 dan**
- **Realisasi PNBP Umum sebesar Rp3.529.917.072,00.**

Adapun perbandingan realisasi PNBP Fungsional TA 2025 dan 2024, disajikan dalam tabel-tabel di bawah ini:

Tabel 8 Rincian Realisasi PNBP Fungsional TA 2025 dan 2024

Jenis Pendapatan	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	9.142.936.522,00	5.265.757.655,00	73,63
Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Korupsi	17.219.202.469,00	15.052.730.104,00	14,39
Pendapatan Ongkos Perkara	1.284.000,00	1.130.000,00	13,63
Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Pencucian Uang	43.345.623.916,00	8.133.307.600,00	432,94
Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Korupsi	18.271.933.264,00	5.301.906.316,00	244,63
Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	76.662.549.056,00	136.728.634.903,00	(43,93)
Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	364.251.250,00	2.589.570.189,00	(85,93)
Pendapatan Gratifikasi yang Ditetapkan KPK Menjadi Milik Negara	4.709.356.338,00	6.230.770.788,00	(24,42)
Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	353.641.798.870,00	311.687.500.010,00	13,46
Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara	-	-	-
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	-	25.000.000,00	(100,00)
Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang	341.490.178,00	200.000.000,00	70,75
JUMLAH	**523.700.425.863,00**	**491.216.307.565,00**	**6,61**

Dari tabel di atas terlihat bahwa PNBP Fungsional TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 6,61% dibandingkan TA 2024. Beberapa pendapatan yang mengalami penurunan antara lain pendapatan uang sitaan hasil korupsi yang telah *inkracht,* pendapatan uang sitaan hasil TPPU yang telah *inkracht,* pendapatan gratifikasi yang ditetapkan KPK menjadi milik negara dan Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya. Penurunan nilai Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan disebabkan adanya penurunan jumlah perkara yang telah diputus yaitu 143 di tahun 2024 dan 116 di tahun 2025.
Sedangkan perbandingan realisasi PNBP Umum TA 2025 dan 2024, disajikan dalam tabel-tabel di bawah ini:

Tabel 9 Rincian Realisasi PNBP Umum TA 2025 dan 2024

Jenis Pendapatan	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	630.179.636,00	123.713.307,00	409,39
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	350.637.904,00	124.449.071,00	181,75
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	2.092.630,00	144.561.181,00	(98,55)
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	1.360.896.136,00	1.324.046.129,00	2,78
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	3.445.953,00	105.032.615,00	(96,72)
Pendapatan Anggaran Lain-lain	59.810.993,00	-	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	174.341.360,00	184.467.336,00	(5,49)
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	-	13.270.000,00	(100,00)

Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	947.028.000,00	319.776.200,00	196,15
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	94.120.999,00	(100,00)
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	216.000,00	(100,00)
Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	1.484.460,00	-	-
JUMLAH	**3.529.917.072,00**	**2.433.652.838,00**	**45,05**

Dari tabel di atas terlihat bahwa PNBP Umum TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 45,05% dibandingkan TA 2024. Pendapatan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL sebesar Rp2.092.630,00 diperoleh dari pengembalian gaji pegawai yang berhenti bekerja dari KPK.

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja Rp1.387.864.616.458,00

Realisasi Belanja KPK TA 2025 adalah sebesar Rp1.387.864.616.458,00 atau 94,76% dari anggaran belanja sebesar Rp1.464.548.473.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 tersaji sebagai berikut:

Tabel 10 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program TA 2025

Program	Anggaran	Realisasi Belanja	%
Sumber Rupiah Murni			
Program Pencegahan dan Penindakan Perkara Korupsi	250.163.496.000,00	187.731.094.709,00	75,04
Program Dukungan Manajemen	1.188.950.201.000,00	1.177.164.023.381,00	99,01
Jumlah Belanja Rupiah Murni	**1.439.113.697.000,00**	**1.364.895.118.090,00**	**94,84**
Pengembalian Belanja	-	812.971.553,00	-
Jumlah Belanja Rupiah Murni Netto	**1.439.113.697.000,00**	**1.364.082.146.537,00**	**94,79**
Sumber PNBP			
Program Pencegahan dan Penindakan Perkara Korupsi	8.393.044.000,00	8.192.860.607,00	97,61
Program Dukungan Manajemen	17.041.732.000,00	15.635.048.276,00	91,75
Jumlah Belanja PNBP	**25.434.776.000,00**	**23.827.908.883,00**	**93,68**
Pengembalian Belanja	-	45.438.962,00	-
Jumlah Belanja PNBP Netto	**25.434.776.000,00**	**23.782.469.921,00**	**93,50**
Belanja Keseluruhan			
Program Pencegahan dan Penindakan Perkara Korupsi	258.556.540.000,00	195.923.955.316,00	75,78
Program Dukungan Manajemen	1.205.991.933.000,00	1.192.799.071.657,00	98,91
Jumlah Belanja Keseluruhan	**1.464.548.473.000,00**	**1.388.723.026.973,00**	**94,82**
Pengembalian Belanja	-	858.410.515,00	-
Jumlah Belanja Keseluruhan Netto	**1.464.548.473.000,00**	**1.387.864.616.458,00**	**94,76**

Realisasi belanja ini berasal dari rupiah murni dan juga PNBP, adapun untuk rincian belanja berdasarkan sumber dana tersaji sebagai berikut:

Tabel 11 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025 berdasarkan Sumber Dana

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	%
Belanja Rupiah Murni			
- Belanja Pegawai	1.051.586.681.000,00	1.048.544.292.808,00	99,71
- Belanja Barang	376.191.860.000,00	306.090.238.537,00	81,37
- Belanja Modal	11.335.156.000,00	10.260.586.745,00	90,52
Jumlah Belanja Rupiah Murni	**1.439.113.697.000,00**	**1.364.895.118.090,00**	**94,84**
Pengembalian Belanja	-	812.971.553,00	-
Jumlah Belanja Rupiah Murni Netto	**1.439.113.697.000,00**	**1.364.082.146.537,00**	**94,79**
Belanja PNBP			
- Belanja Pegawai	-	-	-
- Belanja Barang	24.979.830.000,00	23.392.708.932,00	93,65
- Belanja Modal	454.946.000,00	435.199.951,00	95,66
Jumlah Belanja PNBP	**25.434.776.000,00**	**23.827.908.883,00**	**93,68**
Pengembalian Belanja	-	45.438.962,00	-
Jumlah Belanja PNBP Netto	**25.434.776.000,00**	**23.782.469.921,00**	**93,50**
Belanja Keseluruhan			
- Belanja Pegawai	1.051.586.681.000,00	1.048.544.292.808,00	99,71
- Belanja Barang	401.171.690.000,00	329.482.947.469,00	82,13
- Belanja Modal	11.790.102.000,00	10.695.786.696,00	90,72
Jumlah Belanja Keseluruhan	**1.464.548.473.000,00**	**1.388.723.026.973,00**	**94,82**
Pengembalian Belanja	-	858.410.515,00	-
Jumlah Belanja Keseluruhan Netto	**1.464.548.473.000,00**	**1.387.864.616.458,00**	**94,76**

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

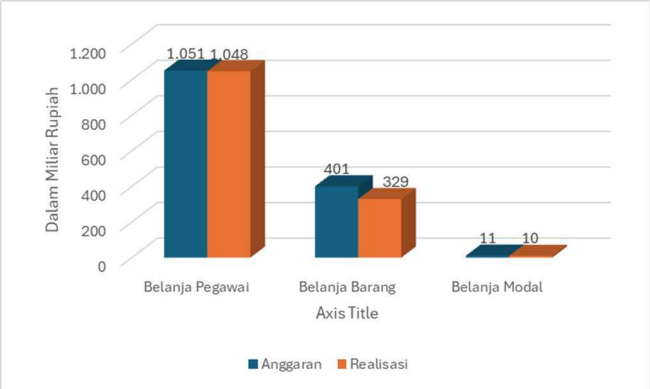

Gambar 2 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025

Realisasi belanja TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp34.284.962.394,00 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 12 Perbandingan Realisasi TA 2025 dan 2024

Kode Jenis Belanja	Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Naik/(Turun)	
		TA 2025	TA 2024	Rp	%
51	Belanja pegawai	1.048.117.501.162,00	891.885.016.911,00	156.232.484.251,00	17,52
52	Belanja Barang	329.051.328.600,00	434.193.278.741,00	(105.141.950.141,00)	(24,22)
53	Belanja Modal	10.695.786.696,00	27.501.358.412,00	(16.805.571.716,00)	(61,11)
JUMLAH		**1.387.864.616.458,00**	**1.353.579.654.064,00**	**34.284.962.394,00**	**2,53**

Pengembalian Belanja

Pengembalian Belanja Rp858.410.515,00

Pengembalian belanja TA 2025 sebesar Rp858.410.515,00 berasal dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang. Rincian pengembalian belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 13 Pengembalian Belanja TA 2025

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Pengembalian
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai PNS	65.163.624,00
5124	Belanja Tunj.Khusus Belanja Pegawai Transito	361.628.022,00
Jumlah Pengembalian Belanja Pegawai		**426.791.646,00**
5211	Belanja Barang Operasional	7.830,00
5212	Belanja Barang Non Operasional	7.011.726,00
5221	Belanja Jasa	400.000,00
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	136.710.914,00
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	287.488.399,00
Jumlah Pengembalian Belanja Barang		**431.618.869,00**
JUMLAH		**858.410.515,00**

Pengembalian belanja yang terkait dengan Belanja Pegawai di antaranya disebabkan oleh pegawai yang keluar dari KPK tidak pada akhir bulan, sehingga gaji yang telah dimintakan ke Kas Negara tidak dapat ditransfer seluruhnya ke pegawai yang keluar tersebut. Sedangkan pengembalian belanja perjalanan dinas disebabkan terutama oleh penggunaan metode SPM-LS Bendahara.

B.2.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Rp1.048.117.501.162,00

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.048.117.501.162,00 dan Rp891.885.016.911,00 atau terjadi kenaikan sebesar 17,52%

Tabel 14 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan TA 2024

Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Naik/(Turun)	
	TA 2025	TA 2024	Rp	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	211.198.366.771,00	175.535.458.203,00	35.662.908.568,00	20,32
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	8.054.755.263,00	6.946.570.349,00	1.108.184.914,00	15,95
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	7.098.851.863,00	56.540.125.823,00	(49.441.273.960,00)	(87,44)
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	822.192.318.911,00	653.810.296.854,00	168.382.022.057,00	25,75
Realisasi Belanja Bruto	**1.048.544.292.808,00**	**892.832.451.229,00**	**155.711.841.579,00**	**17,44**
Pengembalian Belanja	*(426.791.646,00)*	*(947.434.318,00)*	*520.642.672,00*	*(54,95)*
Realisasi Belanja Neto	**1.048.117.501.162,00**	**891.885.016.911,00**	**156.232.484.251,00**	**17,52**

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Rp329.051.328.600,00

Realisasi Belanja Barang TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp329.051.328.600,00 dan Rp434.193.278.741,00. Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami penurunan sebesar 24,22% dari realisasi Belanja Barang TA 2024

Tabel 15 Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2025 dan 2024

Jenis Belanja	TA 2025	TA 2024	Naik/(Turun)	
			Rp	%
Belanja Barang Operasional	36.327.759.318,00	34.577.346.476,00	1.750.412.842,00	5,06
Belanja Barang Non Operasional	24.179.117.042,00	38.429.884.605,00	(14.250.767.563,00)	(37,08)
Belanja Barang Persediaan	3.519.267.973,00	7.770.898.368,00	(4.251.630.395,00)	(54,71)
Belanja Jasa	138.925.950.472,00	178.877.502.761,00	(39.951.552.289,00)	(22,33)
Belanja Pemeliharaan	57.695.288.996,00	46.799.729.184,00	10.895.559.812,00	23,28
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	65.239.079.833,00	124.455.176.185,00	(59.216.096.352,00)	(47,58)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	3.596.483.835,00	5.787.660.647,00	(2.191.176.812,00)	(37,86)
Realisasi Belanja Barang Bruto	**329.482.947.469,00**	**436.698.198.226,00**	**(107.215.250.757,00)**	**(24,55)**
Pengembalian Belanja	(431.618.869,00)	(2.504.919.485,00)	(2.073.300.616,00)	(82,77)
Realisasi Belanja Barang Netto	**329.051.328.600,00**	**434.193.278.741,00**	**(105.141.950.141,00)**	**(24,22)**

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Rp10.695.786.696,00

Realisasi Belanja Modal di KPK TA 2025 dan 2024 sebesar Rp10.695.786.696,00 dan Rp27.501.358.412,00. Adapun rincian untuk masing-masing jenis belanja modal adalah sebagai berikut:

Tabel 16 Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024

Jenis Belanja	TA 2025	TA 2024	Naik/(Turun)	
			Rp	%
Belanja Tanah	-	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	8.349.539.011,00	16.225.254.559,00	(7.875.715.548,00)	(48,54)
Belanja Gedung dan Bangunan	1.426.050.293,00	4.514.493.150,00	(3.088.442.857,00)	(68,41)
Belanja Modal Lainnya	920.197.392,00	6.761.610.703,00	(5.841.413.311,00)	(86,39)
Realisasi Belanja Modal	**10.695.786.696,00**	**27.501.358.412,00**	**(16.805.571.716,00)**	**(61,11)**
Pengembalian Belanja	-	-	-	-
Realisasi Belanja Modal Netto	**10.695.786.696,00**	**27.501.358.412,00**	**(16.805.571.716,00)**	**(61,11)**

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp500.000.000,00

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp500.000.000,00 dan Rp500.000.000,00 merupakan kas yang berasal dari Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal Neraca.

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan Rp0,00

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

C.1.3. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Rp0,00

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran selain dari UP dan TUP. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

C.1.4. Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan

Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan Rp46.810.161.496,00

Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp46.810.161.496,00 dan Rp92.461.036.292,00 yang merupakan Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan atas pendapatan uang sitaan, uang pengganti, biaya perkara yang sudah *inkracht*, jasa giro rekening uang titipan, dan uang gratifikasi yang sampai 31 Desember 2025 belum disetorkan ke Kas Negara. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas serta eksekusinya dapat dilihat pada **Lampiran 2.**

C.1.5. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak Rp1.880.456.367.834,00

Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.880.456.367.834,00 dan Rp1.798.060.019.090,00 yang merupakan semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal laporan keuangan. Rincian Piutang Bukan Pajak KPK per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada **lampiran 3** dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel 17 Rincian Piutang Bukan Pajak Per Akun per 31 Desember 2025 dan 2024

Jenis Piutang	2025	2024	Kenaikan/(Penurunan)	
			Nilai	%
Gratifikasi	495.975.219,00	959.503.731,00	(463.528.512,00)	(48,31)
Uang Pengganti	1.879.935.362.605,00	1.797.099.873.359,00	82.835.489.246,00	4,61
Biaya Perkara	177.500,00	642.000,00	(464.500,00)	(72,35)
PNBP Lainnya	24.852.510,00	-	24.852.510,00	-
Jumlah	**1.880.456.367.834,00**	**1.798.060.019.090,00**	**82.396.348.744,00**	**4,58**

C.1.5.1. Piutang Gratifikasi

Piutang Pendapatan Gratifikasi per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp495.975.219,00 dan Rp959.503.731,00. Piutang Pendapatan Gratifikasi merupakan gratifikasi yang telah ditetapkan menjadi milik negara namun

sampai dengan 31 Desember 2025 belum ada penyetoran ke Kas Negara maupun ke Rekening Bendahara Penerimaan. Rincian Uang Gratifikasi selengkapnya dapat dilihat dalam **Lampiran 3**.

C.1.5.2. Piutang Uang Pengganti

Piutang Uang Pengganti per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.879.935.362.605,00 dan Rp1.797.099.873.359,00. Piutang Uang Pengganti tersebut merupakan uang yang harus dibayar terpidana sehubungan dengan korupsi yang dilakukannya. Rincian Uang Pengganti selengkapnya dapat dilihat dalam **Lampiran 3**.

KPK telah menetapkan kebijakan akuntansi KPK Nomor 1420/KU.03.00/50/05/2025 tanggal 7 Mei 2025 yang dipergunakan sebagai dasar pelunasan uang pengganti melalui PSP dan diterapkan secara prospektif mulai tahun 2025.
Piutang Uang Pengganti dicatat berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan. KPK melakukan upaya penagihan Piutang Uang Pengganti selama Terpidana menjalani masa hukuman pokok. Untuk memantau masa hukuman Terpidana, KPK melakukan pemantauan dengan berdasarkan pada data masa penahanan Terpidana yang diperoleh dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan c.q. Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Pada 31 Desember 2025, terdapat 3 piutang uang pengganti dalam mata uang asing yang dicatat berdasar kurs tanggal pelaporan karena penetapan kurs belum diterima sehingga menimbulkan selisih kurs belum terealisasi. Piutang dimaksud adalah piutang a.n. Redhy Novariza, Muhammad Syahrir, dan Markus Nari.

C.1.5.3. Piutang Biaya Perkara

Piutang Biaya perkara per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp177.500,00 dan Rp642.000,00. Piutang tersebut merupakan biaya yang dikenakan terhadap para terpidana sehubungan dengan perkara yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Rincian biaya perkara selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

C.1.5.4. Piutang Lainnya

Piutang Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Piutang lainnya merupakan piutang yang berasal dari kelebihan bayar atas belanja.

C.1.5.5. Piutang PNBP Lainnya

Piutang PNBP Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp24.852.510,00 dan Rp0,00. Piutang PNBP Lainnya adalah pengakuan piutang atas kelebihan pembayaran belanja pegawai pada tahun anggaran yang lalu yang terdiri dari Belanja Tunjangan Struktural PNS senilai Rp2.140.000,00 dan Belanja Pegawai Tunjangan Kinerja senilai Rp22.712.510,00.

C.1.5.6. Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah

Piutang Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

C.1.6. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak Rp86.776.696.980,00

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp86.776.696.980,00 dan Rp48.272.351.472,00 merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang Bukan Pajak yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

C.1.7. Bagian Lancar TP/TGR (Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi)

Bagian Lancar TP/TGR Rp226.216.708,00

Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp226.216.708,00 dan Rp131.477.508,00 merupakan nilai pembayaran yang akan diterima dalam 12 (dua belas) bulan ke depan atas ganti kerugian hilangnya BMN dan kelebihan pembayaran gaji/tunjangan oleh pegawai KPK.

Rincian Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

C.1.8. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar TP/TGR (Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi)

Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR Rp1.131.084,00

Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.131.084,00 dan Rp657.388,00. Rincian Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

C.1.9. Belanja Dibayar Di Muka

Belanja Dibayar Di Muka Rp7.243.428.793,00

Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp7.243.428.793,00 dan Rp8.877.291.319,00. Belanja Dibayar di Muka merupakan pengeluaran belanja yang telah dapat ditentukan penggunaannya, namun belum menerima manfaat baik berupa barang/jasa atas pengeluaran tersebut.

Rincian Belanja Dibayar Dimuka dapat dilihat pada **Lampiran 6.**

C.1.10. Persediaan

Persediaan Rp1.849.741.746.707,00

Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.849.741.746.707,00 dan Rp1.365.667.525.291,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Jenis Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 18 Rincian Jenis Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024

JENIS PERSEDIAAN		2025	2024
Barang Konsumsi	Rp	1.612.588.235,00	2.277.986.797,00
Amunisi	Rp	291.579.750,00	301.962.155,00
Bahan untuk Pemeliharaan	Rp	129.346.302,00	236.107.217,00
Suku Cadang	Rp	2.854.200,00	4.272.650,00
Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	Rp	1.712.393.844.700,00	1.223.707.736.100,00
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	Rp	8.361.502.700,00	11.108.230.700,00
Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	Rp	121.598.568.000,00	121.598.568.000,00
Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	Rp	5.323.296.431,00	6.377.029.929,00
Bahan Baku	Rp	24.544.159,00	49.270.882,00
Persediaan Lainnya	Rp	3.622.230,00	6.360.861,00
Total	**Rp**	**1.849.741.746.707,00**	**1.365.667.525.291,00**

Persediaan Lainnya untuk Dijual atau diserahkan ke Masyarakat adalah persediaan yang berasal dari barang rampasan para terpidana KPK yang telah *inkracht* dan

perangkat sosialisasi Direktorat Sosial dan Kampanye Antikorupsi. Rincian barang persediaan dapat dilihat pada **Lampiran 7.**

Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat merupakan rampasan berbentuk saham. Nilai wajar saham pada Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp15.124.200.000,00. Nilai saham rampasan tidak dilakukan pengkinian nilai mengingat saham dimaksud merupakan rampasan dan bukan merupakan investasi pemerintah yang memerlukan pengkinian nilai wajar pada tanggal pelaporan.

Terdapat persediaan untuk dijual atau diserahkan ke Masyarakat yang dalam putusan pengadilan digunakan sebagai kompensasi pembayaran Uang Pengganti (UP). Hasil pelelangan barang rampasan digunakan untuk mengurangi piutang UP. Nilai barang rampasan sebagai kompensasi UP merupakan taksiran nilai wajar atas barang rampasan namun bukan merupakan harga pasti. Barang rampasan sebagai kompensasi UP dapat dilihat pada **Lampiran 8**. Terdapat 42 Barang Rampasan yang saat ini masih dalam proses penyelesaian yang dimanfaatkan pihak lain yang dapat dilihat pada **Lampiran 9**.

Selain itu terdapat barang rampasan di luar negeri berupa satu unit apartemen berlokasi di Apartemen Marine Parade Road Silversea level 09 Plot/Unit 09 House/Block 48 Singapore dari kasus TPK terpidana Sdr. EmS tahun 2019 yang telah inkracht pada tahun 2021 sesuai Putusan MARI Nomor 4792K/Pid.Sus/2020 tanggal 23 September 2020. Barang rampasan apartemen telah tercatat dalam Persediaan senilai Rp38.099.933.000,00 berdasarkan laporan internal Nomor LAP-013/Eks.02/12/2021 tanggal 31 Desember 2021.

Dalam Persediaan untuk Dijual atau diserahkan ke Masyarakat terdapat barang persediaan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) barang senilai Rp126.485.366.000,00 yang belum dapat dihapuskan dalam pencatatan dikarenakan masih menunggu persetujuan penghapusan dari Kementerian Keuangan.

Selain itu, terdapat 2 (dua) barang senilai Rp96.044.000,00 yang masih tercatat di neraca per 31 Desember 2025 namun sudah laku lelang dan sudah dihapuskan dari neraca per 31 Maret 2026.

C.2. ASET TETAP

Aset tetap Rp2.267.489.890.383,00

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp2.267.489.890.383,00 dan Rp2.345.099.842.425,00 merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Rincian Aset Tetap KPK adalah sebagai berikut:

Tabel 19 Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024

NO	ASET	2025	2024	KENAIKAN (PENURUNAN)
1	Tanah	1.740.714.091.375,00	1.740.714.091.375,00	-
2	Peralatan dan Mesin	747.362.788.134,00	797.342.361.977,00	(49.979.573.843,00)
3	Gedung dan Bangunan	486.523.552.885,00	485.147.380.592,00	1.376.172.293,00
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	128.816.422.987,00	129.449.501.499,00	(633.078.512,00)
5	Aset tetap lainnya	3.769.603.128,00	3.824.511.498,00	(54.908.370,00)
	Jumlah Bruto	**3.107.186.458.509,00**	**3.156.477.846.941,00**	**(49.291.388.432,00)**
	Akumulasi Penyusutan	*(839.696.568.126,00)*	*(811.378.004.516,00)*	*(28.318.563.610,00)*
	Jumlah Netto	**2.267.489.890.383,00**	**2.345.099.842.425,00**	**(77.609.952.042,00)**

Daftar rincian aset tetap dapat dilihat lebih lengkap pada **Lampiran 10 Laporan Posisi Barang Milik Negara per 31 Desember 2025.**

C.2.1. Tanah

Tanah Rp1.740.714.091.375,00

Nilai Tanah per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp1.740.714.091.375,00 dan Rp1.740.714.091.375,00.
Rincian nilai Tanah tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 20 Rincian Nilai Tanah per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Letak	Luas (m^2)	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Saldo Akhir
1	Jl. Kuningan Persada Kav. 4 Jakarta Selatan	8.663	995.103.878.375,00	-	995.103.878.375,00
2	Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C1 Jakarta Selatan	6.531	680.040.375.000,00	-	680.040.375.000,00
3	Jl. Dewi Sartika RT 1 RW 4, Kel. Cawang Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur	4.320	61.404.480.000,00	-	61.404.480.000,00
4	Jakarta	219	4.165.358.000,00	-	4.165.358.000,00
Total		**19.733**	**1.740.714.091.375,00**	**-**	**1.740.714.091.375,00**

Tabel 21 Rincian Mutasi Tanah per 31 Desember 2025

Saldo per 31 Desember 2024			**1.740.714.091.375,00**
Mutasi Masuk:			
Jumlah Mutasi Masuk		**0,00**	
Mutasi Keluar:			
Jumlah Mutasi Keluar		**(0,00)**	
Saldo per 31 Desember 2025			**1.740.714.091.375,00**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025			(0,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2025			1.740.714.091.375,00

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Buku Peralatan dan Mesin Rp97.929.258.321,00

Nilai Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp747.362.788.134,00 dan Rp797.342.361.977,00. Sedangkan nilai buku Peralatan dan Mesin pada tanggal pelaporan adalah sebesar Rp97.929.258.321,00 yaitu nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutannya adalah sebesar Rp649.433.529.813,00. Adapun rincian mutasi peralatan dan mesin berasal dari:

Tabel 22 Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025

Saldo per 31 Desember 2024			**797.342.361.977,00**
Mutasi Masuk:			
Pembelian (SP2D)	7.585.065.011,00		
Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	569.043.000,00		
Perolehan Lainnya	17.749.000,00		
Batal Transfer Keluar	45.000.000,00		
Penggunaan Kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	34.450.000,00		
Pengembangan Nilai Aset (Langsung) (SP2D)	2.495.000,00		
Jumlah Mutasi Masuk		**8.253.802.011,00**	
Mutasi Keluar:			
Transfer Keluar	(1.187.525.000,00)		
Hibah Keluar	(2.057.110.450,00)		
Penghentian Aset Dari Penggunaan	(54.988.740.404,00)		
Jumlah Mutasi Keluar		**(58.233.375.854,00)**	
Saldo per 31 Desember 2025			**747.362.788.134,00**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025			(649.433.529.813,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2025			97.929.258.321,00

Rincian per Jenis Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

Tabel 23 Rincian per Jenis Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024

Jenis	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
Alat besar	25.793.146.347,00	31.799.999,00	396.269.698,00	25.428.676.648,00
Alat angkutan	22.522.408.572,00	569.043.000,00	3.473.227.450,00	19.618.224.122,00
Alat bengkel dan alat ukur	8.229.556.451,00	36.433.200,00	-	8.265.989.651,00
Alat kantor & rumah tangga	191.823.872.727,00	2.556.448.493,00	1.086.258.465,00	193.294.062.755,00
Alat studio, komunikasi dan pemancar	151.888.883.049,00	1.708.781.950,00	4.651.971.829,00	148.945.693.170,00
Alat kedokteran dan kesehatan	928.806.465,00	44.777.635,00	-	973.584.100,00
Alat laboratorium	11.630.985.779,00	7.294.365,00	7.294.365,00	11.630.985.779,00
Alat persenjataan	11.375.765.617,00	34.327.860,00	-	11.410.093.477,00
Komputer	360.734.348.157,00	3.138.957.157,00	48.618.354.047,00	315.254.951.267,00
Alat eksplorasi	12.320.000,00	-	-	12.320.000,00
Alat keselamatan kerja	7.643.638.951,00	25.716.352,00	-	7.669.355.303,00
Peralatan proses/produksi	3.782.416.000,00	-	-	3.782.416.000,00
Peralatan	-	5.994.000,00	-	5.994.000,00
Peralatan olah raga	976.213.862,00	94.228.000,00	-	1.070.441.862,00
Total	**797.342.361.977,00**	**8.253.802.011,00**	**58.233.375.854,00**	**747.362.788.134,00**

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Buku Gedung dan Bangunan Rp366.622.297.738,00

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp486.523.552.885,00 dan Rp485.147.380.592,00. Sedangkan nilai buku Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutannya adalah sebesar Rp366.622.297.738,00.

Tabel 24 Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025

Saldo per 31 Desember 2024			**485.147.380.592,00**
Mutasi Masuk:			
Pengembangan Nilai Aset (Langsung) (SP2D)	915.903.894,00		
Pengembangan Melalui KDP	510.146.399,00		
Jumlah Mutasi Masuk		**1.426.050.293,00**	
Mutasi Keluar:			
Penghentian Aset Dari Penggunaan	(49.878.000,00)		
Jumlah Mutasi Keluar		**(49.878.000,00)**	
Saldo per 31 Desember 2025			**486.523.552.885,00**
Akumulasi Penyusutan			(119.901.255.147,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2025			366.622.297.738,00

Rincian per Jenis Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 25 Rincian per Jenis Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024

Jenis	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
Bangunan Gedung Tempat Kerja	485.112.180.592,00	1.426.050.293,00	49.878.000,00	486.488.352.885,00
Tugu/Tanda Batas	35.200.000,00	-	-	35.200.000,00
Total	**485.147.380.592,00**	**1.426.050.293,00**	**49.878.000,00**	**486.523.552.885,00**

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Buku Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp58.454.639.821,00

Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp128.816.422.987,00 dan Rp129.449.501.499,00. Sedangkan nilai buku Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebesar Rp58.454.639.821,00 yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya sebesar Rp70.361.783.166,00. Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebagai berikut:

Tabel 26 Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025

Saldo per 31 Desember 2024			**129.449.501.499,00**
Mutasi Masuk:			
Jumlah Mutasi Masuk		**0,00**	
Mutasi Keluar:			
Penghentian Aset Dari Penggunaan	(633.078.512,00)		
Jumlah Mutasi Keluar		**(633.078.512,00)**	
Saldo per 31 Desember 2025			**128.816.422.987,00**
Akumulasi Penyusutan			(70.361.783.166,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2025			58.454.639.821,00

Rincian per Jenis Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah sebagai berikut:

Tabel 27 Rincian per Jenis Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024

Jenis	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
Instalasi Pertahanan	127.057.462.987,00	-	-	127.057.462.987,00
Jaringan Telepon	633.078.512,00	-	633.078.512,00	-
Irigasi	1.758.960.000,00	-	-	1.758.960.000,00
Total	**129.449.501.499,00**	**-**	**633.078.512,00**	**128.816.422.987,00**

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Buku Aset Tetap Lainnya Rp3.769.603.128,00

Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp3.769.603.128,00 dan Rp3.824.511.498,00. Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 terdiri dari Aset Tetap Dalam Renovasi sebesar Rp0,00 dan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp3.769.603.128,00. Tidak ada penyusutan untuk Aset Tetap Lainnya. Aset Tetap Lainnya terdiri dari:

C.2.5.1. Aset Tetap Dalam Renovasi

Saldo Aset Tetap Dalam Renovasi per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp38.081.880,00.

Tabel 28 Rincian per Aset Tetap dalam Renovasi

Saldo per 31 Desember 2024			**38.081.880,00**
Mutasi Masuk:			
Jumlah Mutasi Masuk		**0,00**	
Mutasi Keluar:			
Transfer Keluar	(38.081.880,00)		
Jumlah Mutasi Keluar		**(38.081.880,00)**	
Saldo per 31 Desember 2025			**0,00**
Nilai Buku per 31 Desember 2025			0,00

C.2.5.2. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.769.603.128,00 dan Rp3.786.429.618,00. Rincian mutasi aset lainnya sebagai berikut:

Tabel 29 Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025

Saldo per 31 Desember 2024			**3.786.429.618,00**
Mutasi Masuk:			
Batal Transfer Keluar	16.826.490,00		
Jumlah Mutasi Masuk		**16.826.490,00**	
Mutasi Keluar:			
Transfer Keluar	(33.652.980,00)		
Jumlah Mutasi Keluar		**(33.652.980,00)**	
Saldo per 31 Desember 2025			**3.769.603.128,00**
Nilai Buku per 31 Desember 2025			**3.769.603.128,00**

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp0,00

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan menjadi aset definitif pada Gedung dan Bangunan serta Peralatan dan Mesin.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp839.696.568.126,00

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp839.696.568.126,00 dan Rp811.378.004.516,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025.

Tabel 30 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	1.740.714.091.375,00	-	1.740.714.091.375,00
2	Peralatan dan Mesin	747.362.788.134,00	(649.433.529.813,00)	97.929.258.321,00
3	Gedung dan Bangunan	486.523.552.885,00	(119.901.255.147,00)	366.622.297.738,00
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	128.816.422.987,00	(70.361.783.166,00)	58.454.639.821,00
5	Aset tetap lainnya	3.769.603.128,00	-	3.769.603.128,00
Jumlah		**3.107.186.458.509,00**	**(839.696.568.126,00)**	**2.267.489.890.383,00**

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap dapat dilihat dalam **Lampiran 11**.

C.3. PIUTANG JANGKA PANJANG

C.3.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi

Piutang Tagihan TP/TGR Rp65.871.437,00

Saldo Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp65.871.437,00 dan Rp98.097.071,00 merupakan nilai pembayaran yang akan diterima lebih dari 12 (dua belas) bulan ke depan atas ganti kerugian hilangnya BMN dan kelebihan pembayaran gaji/tunjangan oleh pegawai KPK. Rincian Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dapat dilihat dalam **Lampiran 5.**

C.3.2. Penyisihan Piutang Tak Tertagih TP/TGR

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih TP/TGR Rp329.356,00

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp329.356,00 dan Rp490.485,00. Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Rincian Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dapat dilihat dalam **Lampiran 5.**

C.4. ASET LAINNYA

Nilai Buku Aset Lainnya Rp55.095.741.231,00

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp55.095.741.231,00 dan Rp71.503.765.056,00 merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan menjadi Aset Lancar dan Aset Tetap.
Aset Lainnya pada tanggal pelaporan tersebut terdiri dari:

Tabel 31 Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024

NO	ASET	2025	2024
1	Aset Tak Berwujud	124.844.646.165,00	141.832.293.426,00
2	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	-	-
3	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	22.799.441.822,00	20.965.977.951,00
4	Aset Lain - Lain	88.997.808.287,00	40.527.293.276,00
Jumlah		**236.641.896.274,00**	**203.325.564.653,00**
Akumulasi Penyusutan		*(181.546.155.043,00)*	*(131.821.799.597,00)*
Nilai Buku Aset Lainnya		**55.095.741.231,00**	**71.503.765.056,00**

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud Rp124.844.646.165,00

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp124.844.646.165,00 dan Rp141.832.293.426,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud di KPK berupa perangkat lunak yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Rincian Aset Tak Berwujud dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 32 Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025

Jenis	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
Software	81.813.831.847,00	1.718.933.521,00	6.744.400.125,00	76.788.365.243,00
Lisensi	58.632.738.302,00	4.435.871.793,00	16.398.052.450,00	46.670.557.645,00
Hasil Kajian/Penelitian	-	-	-	-
Aset Tak Berwujud Lainnya	1.385.723.277,00	-	-	1.385.723.277,00
Total	**141.832.293.426,00**	**6.154.805.314,00**	**23.142.452.575,00**	**124.844.646.165,00**

Untuk Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud sebagaimana berikut ini:

Tabel 33 Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025

Saldo per 31 Desember 2024			**141.832.293.426,00**
Mutasi Masuk:			
Pembelian (SP2D)	112.616.892,00		
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	4.796.398.831,00		
Penyelesaian Pembangunan	412.975.500,00		
Pengembangan Nilai Aset (Langsung) (SP2D)	394.605.000,00		
Koreksi Susulan	438.209.091,00		
Jumlah Mutasi Masuk		**6.154.805.314,00**	
Mutasi Keluar:			
Koreksi Pencatatan	(4.796.398.831,00)		
Penghentian Aset Dari Penggunaan	(18.346.053.744,00)		
Jumlah Mutasi Keluar		**(23.142.452.575,00)**	
Saldo per 31 Desember 2025			**124.844.646.165,00**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025			(92.599.169.726,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2025			**32.245.476.439,00**

C.4.2. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan Rp0,00

Saldo Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan menjadi aset definitif pada Aset Tak Berwujud.

Tabel 34 Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025

Saldo per 31 Desember 2024			**0**
Mutasi Masuk:			
Perolehan/Penambahan KDP (SP2D)	58.996.500,00		
Pengembangan KDP (SP2D)	353.979.000,00		
Jumlah Mutasi Masuk		**412.975.500,00**	
Mutasi Keluar:			
Reklasifikasi KDP menjadi barang jadi	412.975.500,00		
Jumlah Mutasi Keluar		**(412.975.500,00)**	
Saldo per 31 Desember 2025			**0**
Nilai Buku per 31 Desember 2025			0

C.4.3. Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga

Nilai Buku Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga Rp22.799.441.822,00

Nilai Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp22.799.441.822,00 dan Rp20.965.977.951,00. Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga merupakan dana yang berasal dari Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA). RPATA ini merupakan dana yang digunakan untuk menggantikan mekanisme pencatatan bank garansi. Mekanisme RPATA dimulai pada tahun anggaran 2023. Rincian RPATA dapat dilihat pada lampiran 20.

C.4.4. Aset Lain-Lain

Nilai Buku Aset Lain-lain Rp50.822.970,00

Nilai perolehan Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp88.997.808.287,00 dan Rp40.527.293.276,00. Sedangkan nilai buku Aset Lain–lain neto pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya adalah sebesar Rp50.822.970,00.

Rincian per Jenis Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel 35 Rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2025

Jenis	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
Alat Bantu	-	341.922.028,00	-	341.922.028,00
Alat Angkut Darat Bermotor	1.574.277.400,00	2.411.270.000,00	2.931.397.400,00	1.054.150.000,00
Alat Kantor	6.188.199.453,00	509.382.500,00	-	6.697.581.953,00
Alat Studio	3.225.278.496,00	893.231.000,00	22.801.000,00	4.095.708.496,00
Alat Komunikasi	2.405.526.255,00	2.217.000.829,00	41.508.800,00	4.581.018.284,00
Peralatan Pemancar	228.800.000,00	57.200.000,00	-	286.000.000,00
Komputer Unit	53.854.990,00	18.487.398.771,00	47.900.000,00	18.493.353.761,00
Peralatan Komputer	22.694.981.977,00	30.071.335.276,00	1.200.000,00	52.765.117.253,00
Bangunan Gedung Tempat Kerja	-	14.678.000,00	-	14.678.000,00
Tugu/Tanda Batas	-	35.200.000,00	-	35.200.000,00
Jaringan Telepon	-	633.078.512,00	-	633.078.512,00
Aset Tak Berwujud	4.156.374.705,00	18.346.053.744,00	22.502.428.449,00	-
Total	**40.527.293.276,00**	**74.017.750.660,00**	**25.547.235.649,00**	**88.997.808.287,00**
Akumulasi penyusutan	**(36.370.918.571,00)**			**(88.946.985.317,00)**
Nilai Buku (neto)	**4.156.374.705,00**			**50.822.970,00**

C.4.5. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp181.546.155.043,00

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp181.546.155.043,00 dan Rp131.821.799.597,00. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 36 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan & Amortisasi	Nilai Buku
	Aset Tak Berwujud			
1	Software	76.788.365.243,00	(68.454.414.770,00)	8.333.950.473,00
2	Lisensi	46.670.557.645,00	(24.144.754.956,00)	22.525.802.689,00
3	Aset Tak Berwujud Lainnya	1.385.723.277,00	-	1.385.723.277,00
	Jumlah	**124.844.646.165,00**	**(92.599.169.726,00)**	**32.245.476.439,00**
	Aset Lain-Lain			
4	Aset Lain-Lain	88.997.808.287,00	(88.946.985.317,00)	50.822.970,00
	Jumlah	**213.842.454.452,00**	**(181.546.155.043,00)**	**32.296.299.409,00**

C.5. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga Rp259.490.382.453,00

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp259.490.382.453,00 dan Rp303.279.304.003,00. Utang kepada pihak ketiga terdiri atas kewajiban umum yang merupakan kewajiban yang dapat muncul pada kementerian lembaga dan kewajiban fungsional yang merupakan kewajiban yang muncul atas pelaksanaan fungsi penegakan hukum oleh KPK. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga dapat dilihat pada **lampiran 12**. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga atas barang rampasan dapat dilihat pada **lampiran 8**.

C.5.2. Utang yang belum ditagihkan

Utang yang belum ditagihkan Rp0,00

Saldo Utang yang belum ditagihkan adalah sebesar Rp0,00. Utang yang belum ditagihkan merupakan pos yang menampung tagihan oleh pihak ketiga yang belum menjadi Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

C.5.3. Uang Muka dari KPPN

Uang muka dari KPPN Rp500.000.000,00

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp500.000.000,00 dan Rp500.000.000,00 merupakan UP/TUP yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.5.4. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka Rp146.730.570,00

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp146.730.570,00 dan Rp161.681.361,00. Pendapatan Diterima Dimuka adalah pendapatan yang sudah diterima KPK tetapi belum menjadi hak KPK karena masih terdapat kewajiban KPK untuk memberikan barang/jasa sebagai konsekuensi penerimaan pendapatan tersebut. Pendapatan Diterima Dimuka ini adalah pendapatan sewa yang dibayar dimuka oleh para rekanan, yang dapat dilihat dalam **Lampiran 13**

C.5.5. Hibah Langsung yang belum disahkan

Hibah Langsung yang belum disahkan Rp0,00

Saldo Hibah Langsung yang belum disahkan per 31 Desember 2025 adalah Rp0,00. Hibah yang belum disahkan tersebut merupakan hibah barang/jasa yang belum disahkan sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan.

C.5.6. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka pendek lainnya Rp0,00

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 adalah Rp0,00. Utang Jangka Pendek Lainnya tersebut merupakan pungutan potongan pajak oleh Bendahara Pengeluaran yang belum disetorkan sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan.

C.6. EKUITAS

Ekuitas Rp5.760.714.154.146,00

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp5.760.714.154.146,00 dan Rp5.330.184.569.343,00. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNBP Rp1.629.780.474.085,00

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.629.780.474.085,00 dan Rp1.773.973.427.802,00. Penurunan pendapatan sebesar 8,13% sebagian besar dipengaruhi oleh penurunan Pendapatan Uang Pengganti, Pendapatan Sitaan/Rampasan dan Pendapatan Barang Sitaan/Rampasan. Adapun rincian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 37 Rincian Pendapatan PNBP-LO 31 Desember 2025 dan 2024

Jenis Pendapatan	2025	2024	Kenaikan/Penurunan	
			Nilai	%
Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	189.292.151,00	167.684.713,00	21.607.438,00	12,89
Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	-	13.270.000,00	(13.270.000,00)	(100,00)
Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	9.516.126.618,00	5.402.164.810,00	4.113.961.808,00	76,15
Denda Hasil Tindak Pidana Korupsi	17.174.785.469,00	16.122.730.104,00	1.052.055.365,00	6,53
Ongkos Perkara	784.500,00	1.182.000,00	(397.500,00)	(33,63)
Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Korupsi	27.561.866.481,00	17.387.795.936,00	10.174.070.545,00	58,51
Uang Sitaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	364.251.250,00	2.589.570.189,00	(2.225.318.939,00)	(85,93)
Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Pencucian Uang	43.345.623.916,00	3.295.829.600,00	40.049.794.316,00	1.215,17
Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	80.558.083.418,00	131.449.828.036,00	(50.891.744.618,00)	(38,72)
Gratifikasi yang Ditetapkan KPK Menjadi Milik Negara	4.246.791.345,00	6.704.468.318,00	(2.457.676.973,00)	(36,66)
Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	794.028.770.085,00	833.921.703.489,00	(39.892.933.404,00)	(4,78)
Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	630.179.636,00	120.594.674,00	509.584.962,00	422,56
Anggaran Lain-lain	59.810.993,00	-	59.810.993,00	-
Sitaan/Rampasan	651.904.108.223,00	756.429.899.755,00	(104.525.791.532,00)	(13,82)
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	-	25.000.000,00	(25.000.000,00)	(100,00)
Denda Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang	200.000.000,00	341.490.178,00	(141.490.178,00)	(41,43)
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	216.000,00	(216.000,00)	(100,00)
JUMLAH	**1.629.780.474.085,00**	**1.773.973.427.802,00**	**(144.192.953.717,00)**	**(8,13)**

Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan merupakan pendapatan yang berasal dari sewa kantin, mesin ATM dan Warung Kejujuran KPK.

Pendapatan Ongkos Perkara adalah pendapatan dari ongkos perkara yang dibebankan kepada para terpidana KPK mulai Pengadilan Negeri sampai dengan tingkat Mahkamah Agung yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Pendapatan Gratifikasi adalah pendapatan yang berasal dari barang gratifikasi berupa uang yang telah ditetapkan sebagai milik negara berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan KPK.

Pendapatan Uang Sitaan TPK merupakan pendapatan atas setoran uang sitaan yang dirampas untuk negara dari para terpidana KPK berdasarkan putusan pengadilan yang telah *inkracht* yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi (TPK).

Pendapatan Uang Sitaan TPPU merupakan pendapatan atas setoran uang sitaan yang dirampas untuk negara dari para terpidana KPK berdasarkan putusan pengadilan yang telah *inkracht* yang berasal dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Pendapatan Uang Pengganti TPK adalah pendapatan yang berasal dari pidana tambahan kepada terpidana KPK berdasarkan putusan sidang yang telah *inkracht*.

Pendapatan Penjualan Hasil Lelang TPK adalah pendapatan hasil penjualan atas barang sitaan yang dirampas untuk negara dari para terpidana KPK berdasarkan putusan pengadilan yang telah *inkracht* yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi (TPK).

Pendapatan Penjualan Hasil Lelang TPPU adalah pendapatan hasil penjualan atas barang sitaan yang dirampas untuk negara dari para terpidana KPK berdasarkan putusan pengadilan yang telah *inkracht* yang berasal dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Pendapatan Hasil Denda TPK adalah pendapatan yang berasal dari denda terpidana KPK berdasarkan putusan sidang yang telah *inkracht* yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi (TPK).

Pendapatan Hasil Denda TPPU adalah pendapatan yang berasal dari denda terpidana KPK berdasarkan putusan sidang yang telah *inkracht* yang berasal dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Pendapatan Jasa Giro merupakan pendapatan-LO yang berasal dari bunga bank atas saldo pada rekening giro KPK dan rekening penampungan sementara uang sitaan dari para terpidana/pihak lain yang perkaranya sedang ditangani oleh KPK.

Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian atas Pekerjaan Pemerintah adalah pendapatan yang berasal dari denda kepada penyedia barang/jasa yang melewati batas waktu penyelesaian pekerjaan sesuai kontrak yang telah disepakati.

Pendapatan Anggaran Lain-lain merupakan pendapatan lain yang diterima KPK.

Pendapatan Sitaan/Rampasan adalah pendapatan yang berasal dari hasil penilaian barang sitaan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht).* Pengakuan pendapatan atas barang rampasan yang menjadi kompensasi uang pengganti dinilai secara mandiri oleh tim penilai. Adapun rinciannya terdapat pada **Lampiran 8**.

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai Rp932.385.646.263,00

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp932.385.646.263,00 dan Rp1.005.813.733.000,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pegawai KPK. Rincian Beban Pegawai untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 38 Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2025 dan 2024

Jenis Beban	2025	2024	Kenaikan/Penurunan	
			Rp	%
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	187.422.223.215,00	196.019.400.184,00	(8.597.176.969,00)	(4,39)
Beban Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	8.054.755.263,00	6.822.498.677,00	1.232.256.586,00	18,06
Beban Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	7.098.851.863,00	56.491.644.452,00	(49.392.792.589,00)	(87,43)
Beban Tunj.Khusus Belanja Pegawai Transito	729.809.815.922,00	746.480.189.687,00	(16.670.373.765,00)	(2,23)
JUMLAH	**932.385.646.263,00**	**1.005.813.733.000,00**	**(73.428.086.737,00)**	**(7,30)**

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan Rp3.010.168.773,00

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.010.168.773,00 dan Rp4.050.112.401,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai. Rincian Beban Persediaan untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 39 Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024

JENIS BEBAN	2025	2024	KENAIKAN/PENURUNAN	
			NILAI	%
Konsumsi	2.946.948.065,00	3.946.018.767,00	(999.070.702,00)	(25,32)
Amunisi	10.382.405,00	43.649.540,00	(33.267.135,00)	(76,21)
Bahan Baku	46.214.672,00	33.904.482,00	12.310.190,00	36,31
Persediaan Lainnya	6.623.631,00	26.539.612,00	(19.915.981,00)	(75,04)
JUMLAH	**3.010.168.773,00**	**4.050.112.401,00**	**(1.039.943.628,00)**	**(25,68)**

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Rp231.288.138.376,00

Beban Barang dan Jasa Periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp231.288.138.376,00 dan Rp250.305.371.426,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 40 Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2025 dan 2024

JENIS BEBAN	2025	2024	KENAIKAN/PENURUNAN	
			NILAI	%
Barang Operasional	36.037.116.911,00	34.321.506.794,00	1.715.610.117,00	5,00
Barang Non Operasional	24.080.961.663,00	38.234.194.948,00	(14.153.233.285,00)	(37,02)
Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	58.291.650,00	108.264.960,00	(49.973.310,00)	(46,16)
Langganan Daya dan Jasa	18.580.634.402,00	19.497.606.768,00	(916.972.366,00)	(4,70)
Jasa Konsultan	30.757.764.997,00	28.215.342.180,00	2.542.422.817,00	9,01
Sewa	42.731.685.604,00	47.680.365.824,00	(4.948.680.220,00)	(10,38)
Jasa Profesi	48.044.996.258,00	18.271.986.181,00	29.773.010.077,00	162,94
Jasa Lainnya	30.996.686.891,00	63.976.103.771,00	(32.979.416.880,00)	(51,55)
JUMLAH	**231.288.138.376,00**	**250.305.371.426,00**	**(19.017.233.050,00)**	**(7,60)**

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Rp58.279.990.911,00

Beban pemeliharaan Periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp58.279.990.911,00 dan Rp46.411.572.760,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada kepada kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 41 Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2025 dan 2024

Jenis Beban	2025	2024	Kenaikan/Penurunan	
			Rp	%
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.406.269.450,00	2.678.519.470,00	(272.250.020,00)	(10,16)
Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan	824.452.178,00	820.029.208,00	4.422.970,00	0,54
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	30.834.997.563,00	28.466.764.196,00	2.368.233.367,00	8,32
Belanja Pemeliharaan Lainnya	23.342.035.463,00	13.631.289.520,00	9.710.745.943,00	71,24
Belanja Persediaan bahan untuk pemeliharaan	870.817.807,00	813.901.386,00	56.916.421,00	6,99
Belanja Persediaan suku cadang	1.418.450,00	1.068.980,00	349.470,00	32,69
JUMLAH	**58.279.990.911,00**	**46.411.572.760,00**	**11.868.418.151,00**	**25,57**

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Rp68.411.364.355,00

Beban Perjalanan Dinas Periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp68.411.364.355,00 dan Rp129.476.868.942,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Penurunan belanja perjalanan dinas sebesar 47,16% disebabkan oleh adanya Instruksi Presiden tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yakni Inpres 1 Tahun 2025 terhadap akun belanja perjalanan dinas. Rincian Beban perjalanan dinas untuk Periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 42 Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2025 dan 2024

JENIS BEBAN	2025	2024	KENAIKAN/PENURUNAN	
			NILAI	%
Perjalanan Biasa	60.172.675.516,00	100.966.745.970,00	(40.794.070.454,00)	(40,40)
Perjalanan Dinas Dalam Kota	766.788.096,00	1.038.438.189,00	(271.650.093,00)	(26,16)
Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.077.680.164,00	2.261.411.146,00	(1.183.730.982,00)	(52,34)
Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2.934.447.658,00	19.600.464.449,00	(16.666.016.791,00)	(85,03)
Perjalanan Biasa - Luar Negeri	3.363.479.405,00	3.666.737.111,00	(303.257.706,00)	(8,27)
Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	96.293.516,00	1.943.072.077,00	(1.846.778.561,00)	(95,04)
JUMLAH	**68.411.364.355,00**	**129.476.868.942,00**	**(61.065.504.587,00)**	**(47,16)**

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp237.498.584.048,00

Beban Barang Yang Diserahkan Ke Masyarakat untuk Periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp237.498.584.048,00 dan Rp191.056.046.439,00. Beban tersebut berasal dari barang rampasan dan perangkat sosialisasi dari program kegiatan antikorupsi. Kenaikan beban yang diserahkan kepada masyarakat/pemda sebesar 24,31% dikarenakan adanya lelang barang rampasan maupun hibah barang rampasan ke pemda berupa tanah dan peralatan dan mesin. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk Periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 43 Rincian Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat 31 Desember 2025 dan 2024

Jenis Beban	2025	2024	Kenaikan/Penurunan	
			Rp	%
Belanja Persediaan tanah bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	217.053.275.000,00	165.558.104.000,00	51.495.171.000,00	31,10
Belanja Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	14.217.910.000,00	21.006.447.854,00	(6.788.537.854,00)	(32,32)
Beban Persediaan Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	-	-	-	-
Belanja Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	6.227.399.048,00	4.491.494.585,00	1.735.904.463,00	38,65
JUMLAH	**237.498.584.048,00**	**191.056.046.439,00**	**46.442.537.609,00**	**24,31**

D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp102.385.014.704,00

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp102.385.014.704,00 dan Rp108.178.480.005,00. Beban penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk aset tidak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 44 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2025 dan 2024

Jenis Beban	2025	2024	Kenaikan/Penurunan	
			Rp	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	67.206.923.483,00	70.482.567.187,00	(3.275.643.704,00)	(4,65)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	15.002.448.814,00	14.748.414.004,00	254.034.810,00	1,72
Beban Penyusutan Irigasi	103.468.235,00	103.468.236,00	(1,00)	(0,00)
Beban Penyusutan Jaringan	5.006.535.637,00	5.022.583.762,00	(16.048.125,00)	(0,32)
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	11.480.768,00	-	11.480.768,00	-
Jumlah Penyusutan	**87.330.856.937,00**	**90.357.033.189,00**	**(3.026.176.252,00)**	**(3,35)**
Beban Amortisasi Software	10.205.322.996,00	12.457.286.773,00	(2.251.963.777,00)	(18,08)
Beban Amortisasi Lisensi	4.299.439.457,00	5.364.160.043,00	(1.064.720.586,00)	(19,85)
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	-	-	-	-
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	549.395.314,00	-	549.395.314,00	-
Jumlah Amortisasi	**15.054.157.767,00**	**17.821.446.816,00**	**(2.767.289.049,00)**	**(15,53)**
JUMLAH	**102.385.014.704,00**	**108.178.480.005,00**	**(5.793.465.301,00)**	**(5,36)**

D.9. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp40.189.257.807,00

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp40.189.257.807,00 dan Rp37.314.101.041,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 45 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 31 Desember 2025 dan 2024

Jenis Beban	2025	2024	Kenaikan/Penurunan	
			Rp	%
Penyisihan Piutang Jk. Pendek	40.188.945.240,00	37.313.265.787,00	2.875.679.453,00	7,71
Penyisihan Piutang Jk. Panjang	312.567,00	835.254,00	(522.687,00)	(62,58)
JUMLAH	**40.189.257.807,00**	**37.314.101.041,00**	**2.875.156.766,00**	**7,71**

D.10. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Defisit Dari Kegiatan Non Operasional (Rp22.311.208.810,00)

Pos surplus/defisit dari kegiatan non operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp22.311.208.810,00) dan Rp5.978.656.979,00 dengan rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 46 Rincian Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

31 Desember 2025 dan 2024

Jenis Transaksi	2025	2024	Kenaikan/Penurunan	
			Rp	%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	947.028.000,00	319.776.200,00	627.251.800,00	196,15
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	94.120.999,00	(94.120.999,00)	(100,00)
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	413.151.470,00	291.500.000,00	121.651.470,00	41,73
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	26.945.140,00	144.561.181,00	(117.616.041,00)	(81,36)
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	294.743.152,00	414.537.372,00	(119.794.220,00)	(28,90)
Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	1.484.460,00	-	1.484.460,00	-
Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi	1.024.458.160,00	15.704.961.705,00	(14.680.503.545,00)	(93,48)
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	1.990.000,00	-	1.990.000,00	-
Beban Pelepasan Aset	(12.068.934.181,00)	(987.801.648,00)	(11.081.132.533,00)	1.121,80
Belanja Penyesuaian Nilai Persediaan	(2.179.768.000,00)	(752.081,00)	(2.179.015.919,00)	289.731,55
Belanja Persediaan Rusak/Usang	(5.339.030,00)	(28.549.000,00)	23.209.970,00	(81,30)
Belanja Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	(10.766.967.981,00)	(9.973.697.749,00)	(793.270.232,00)	7,95
JUMLAH	**(22.311.208.810,00)**	**5.978.656.979,00**	**(28.289.865.789,00)**	**(473,18)**

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Rp5.330.184.569.343,00

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp5.330.184.569.343,00 dan Rp4.744.670.714.755,00.

E.2. Surplus (Defisit) LO

Surplus (Defisit) LO (Rp65.978.899.962,00)

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar (Rp65.978.899.962,00) dan Rp7.345.798.767,00. Rincian Surplus/(Defisit) LO sebesar (Rp65.978.899.962,00) merupakan nilai dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 47 Rincian Surplus (Defisit) LO pada 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ (Penurunan)	
			Rp	%
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	(43.667.691.152,00)	1.367.141.788,00	(45.034.832.940,00)	(3.294,09)
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(22.311.208.810,00)	5.978.656.979,00	(28.289.865.789,00)	(473,18)
JUMLAH	**(65.978.899.962,00)**	**7.345.798.767,00**	**(73.324.698.729,00)**	**(998,19)**

E.3. Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset Rp0,00

Tidak ada penyesuaian nilai aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024. Penyesuaian nilai aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan akuntansi pemerintah yang menggunakan metode harga perolehan terakhir.

E.4. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan (Rp6.409.316.000,00)

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp6.409.316.000,00) dan (Rp5.403.302.919,00). Koreksi tersebut sebagian besar berasal dari koreksi nilai barang rampasan.

E.5. Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya

Koreksi Atas Reklasifikasi Rp0,00

Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Merupakan koreksi atas reklasifikasi aset masuk dari persediaan maupun reklasifikasi ke Aset Lainnya.

E.6. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0,00

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian aset tetap. Nilai Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0,00 dan Rp0,00.

E.7. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Rp325.387.051,00

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp325.387.051,00 dan Rp0,00.

E.8. Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Aset Lainnya Non Revaluasi Rp438.209.090,00

Nilai Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp438.209.090,00 dan (Rp12.470.040,00). Koreksi tersebut merupakan usulan koreksi BPK terkait pencatatan software Survei Penilaian Integritas.

E.9. Koreksi Lainnya

Koreksi Lain-lain (Rp340.775.047.833,00)

Koreksi Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp340.775.047.833,00) dan (Rp156.709.143.757,00). Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara. Sebagian besar berasal dari penghapusan piutang uang pengganti terpidana yang telah selesai menjalankan subsider uang pengganti serta penghapusan melalui pengurangan barang rampasan kompensasi UP yang telah ditetapkan status penggunaannya (PSP).

E.10. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas Rp842.929.252.457,00

Nilai transaksi antar entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp842.929.252.457,00 dan Rp740.292.972.537,00. Rincian Nilai transaksi antar entitas adalah sebagai berikut:

Tabel 48 Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ (Penurunan)	
			Nilai	%
Ditagihkan ke Entitas Lain	1.387.864.616.458,00	1.353.579.654.064,00	34.284.962.394,00	2,53
Diterima Dari Entitas Lain	(527.230.342.935,00)	(493.649.960.403,00)	(33.580.382.532,00)	6,80
Transfer Keluar	(49.452.991.370,00)	(119.636.721.124,00)	70.183.729.754,00	(58,66)
Transfer Masuk	17.749.000,00	-	17.749.000,00	-
Pengesahan Hibah Langsung	31.730.221.304,00	-	31.730.221.304,00	-
Jumlah	**842.929.252.457,00**	**740.292.972.537,00**	**102.636.279.920,00**	**13,86**

E.11. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Rp5.760.714.154.146,00

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp5.760.714.154.146,00 dan Rp5.330.184.569.343,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Lokasi dan Status Kantor KPK

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPK menempati beberapa gedung, yaitu:

- Gedung Merah Putih di Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta Selatan.
- Gedung di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1 Kuningan, Jakarta Selatan. Berdasarkan KMK Nomor 130/KM.6/2015 tanggal 18 Maret 2015 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, gedung dan tanah menjadi milik KPK serta BAST Nomor BA-110/KN/2016 tanggal 21 September 2016.
- Gedung Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan KPK di Jl. Dewi Sartika Nomor 255 Cawang, Jakarta Timur.

F.2. Hibah yang Diterima KPK

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, hibah yang dicantumkan dalam DIPA adalah hibah yang diterima dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan, sedangkan hibah dalam bentuk barang/jasa dicantumkan dalam Neraca dan diungkap dalam CaLK.

KPK menerima hibah langsung bentuk barang/jasa yang pelaksanaan dan pengelolaan dananya dilakukan oleh negara donor. Hibah yang diterima yakni hibah dari Jerman - *Deutsche Gesellschaft Fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) – Corruption Prevention in the Forestry Sector.* Berdasarkan perjanjian antara GIZ dan KPK IA for TCP No. 51 Tahun 2022 tanggal 1 Agustus 2022, dan Amandemen Perjanjian Pelaksanaan untuk Proyek Kerja Sama Teknis tanggal 29 September 2023, KPK menerima hibah langsung bentuk barang dan jasa untuk proyek *Corruption Prevention in the Forestry Sector* dengan Nomor Register 2QD1BTGA. Jangka waktu perjanjian mulai 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2026. Nilai proyek yang diterima KPK adalah EUR 5.000.000,00.

Pada Tahun 2025 KPK melakukan pengesahan hibah jasa senilai EUR 1.882.952,00 atau Rp31.730.221.304,00 berupa implementasi kegiatan periode Januari 2023 – Desember 2024 sesuai BAST Nomor B/96.2/KU.05.00/50-52/03/2025 Tanggal 21 Maret 2025 yang disahkan melalui Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa (MPHLBJS) Nomor 00974A Tanggal 24 April 2025.

F.3. Uang di Pengelola Titipan Uang Sitaan Tindak Pidana Korupsi dan Gratifikasi

Terdapat uang di Pengelola Titipan Uang Sitaan Tindak Pidana Korupsi dan Gratifikasi yang belum berkekuatan hukum tetap sehingga belum dapat disetorkan ke Kas Negara. Titipan uang sitaan tindak pidana korupsi diadministrasikan oleh Biro Keuangan serta Kedeputian Penindakan dan Eksekusi, sedangkan titipan uang gratifikasi diadministrasikan oleh Biro Keuangan serta Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik. Sampai dengan 31 Desember 2025, rincian uang adalah sebagai berikut:

Tabel 49 Rincian Uang di Pengelola Titipan Uang Sitaan dan Gratifikasi

Kas di Pengelola Titipan Uang Sitaan dan Gratifikasi Biro Keuangan, terdiri dari:		
Rupiah	Rp	1.042.058.094.322,04
Dolar Amerika	USD	9.897.039,94
Dolar Singapura	SGD	10.201.624,92
Yen Jepang	JPY	1.557.000,00
Dolar Australia	AUD	1.119.535,00
Poundsterling	GBP	161.645,00
Euro	EUR	333.145,00
Franc Swiss	CHF	330,00
Riyal Saudi Arabia	SAR	42.021,00
Ringgit Malaysia	MYR	63.985,00
Dong Vietnam	VND	2.629.000,00
Baht Thailand	THB	135.260,00
Peso Filipina	PHP	2.220,00
Rupee India	INR	430,00
Won Korea	KRW	6.759.000,00
Yuan China	CNY	25.124,00
Dolar Hongkong	HKD	7.060,00
Lira Turki	TRY	5,00
Kyat Myanmar	MMK	61.000,00
Rubel Rusia	RUB	250,00
Dolar Taiwan	TWD	2.300,00
Manat Azerbaijan	AZN	1,00
Riel Kamboja	KHR	1.500,00
Rand Afrika Selatan	ZAR	150,00
Dolar Kanada	CAD	20,00
Dirham Uni Emirat Arab	AED	1.600,00
Pound Mesir	EGP	382,00
Kip Laos	LAK	13.020,00
Real Brasil	BRL	7.935,00
Som Uzbekistan	UZS	26.323.000,00
Dolar Selandia Baru	NZD	617.300,00
Taka Bangladesh	BDT	4.100,00
Dolar Brunei	BND	12,00
Koruna Ceko	CZK	31.600,00
Rupee Sri Lanka	LKR	7.100,00
Dinar Libya	LYD	10,00
Tugrik Mongolia	MNT	5,00
Pataca Makau	MOP	20,00
Naira Nigeria	NGN	1.000,00

F.4. Denda yang Belum Dibayar

Sampai kurun waktu tahun 2005, terdapat uang denda yang belum dibayar para terpidana. Sesuai fatwa Ketua MA Nomor: 040/KMA/III/2010 tanggal 29 Maret 2010 pembayaran denda merupakan pilihan dan dapat diganti dengan subsider pidana penjara. Penghapusan denda melalui subsider pidana penjara dilakukan apabila terpidana telah menyelesaikan pidana penjara subsider denda yang dibuktikan dengan Surat Lepas dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun dokumen lain yang sah.

Terhadap terpidana yang telah bebas namun dokumen bebas belum didapatkan, maka belum dapat dihapuskan. Terkait hal tersebut KPK akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan c.q. Lembaga Pemasyarakatan terkait data narapidana yang telah bebas yang telah menjalani subsider pidana penjara denda. Dengan memperhatikan hal tersebut, denda dari tahun 2005 s.d. 31 Desember 2025 yang dapat ditagihkan adalah sebagai berikut:

Tabel 50 Rincian Denda Per 31 Desember 2025

URAIAN	NILAI
Saldo awal 01 Januari 2025	**103.422.996.322,00**
Penambahan denda s.d. 31 Desember 2025	31.400.000.000,00
Pelunasan/Penghapusan denda s.d. 31 Desember 2025	28.686.623.387,00
Saldo Denda Per 31 Desember 2025	**106.136.372.935,00**

Adapun rincian atas saldo denda tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

F.5. Barang Gratifikasi Belum Diserahkan ke Kementerian Keuangan

Sampai dengan 31 Desember 2025 terdapat barang gratifikasi yang belum diserahkan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Rincian barang gratifikasi tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 14.**

F.6. Barang Gratifikasi Belum Diserahkan oleh Pelapor

Terdapat barang gratifikasi yang telah ditetapkan Pimpinan KPK menjadi milik negara namun sampai dengan 31 Desember 2025 belum diserahkan oleh pelapor ke Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring. Rincian barang gratifikasi tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 15.**

F.7. Barang Gratifikasi Yang Belum Ditetapkan Status Kepemilikannya

Sampai dengan 31 Desember 2025 tidak terdapat barang gratifikasi yang belum ditetapkan status kepemilikannya.

F.8. Pengelolaan Tunjangan Hari Tua (THT) Pimpinan dan Pegawai KPK

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pasal 15 Ayat (3a) Peraturan

Pemerintah Nomor 103 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi, Pimpinan, Penasihat, dan Pegawai KPK diberikan Tunjangan Hari Tua (THT).

THT tersebut dikelola pihak ketiga dan akan dibayarkan kepada pimpinan/pegawai saat pimpinan/pegawai selesai menjalani tugas di KPK.

F.9. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah merupakan rekening milik satuan kerja lingkup kementerian/lembaga yang dimiliki dan atas nama KPK sampai dengan 31 Desember 2025. Rekening tersebut antara lain berupa rekening Bendahara Pengeluaran, rekening Bendahara Penerimaan, rekening Titipan Uang Sitaan TPK dan Gratifikasi, Rekening Dana Nasabah (RDN) dan RKK KPK OPS. RDN tersebut merupakan rekening yang digunakan untuk menampung dana hasil *corporate action* saham yang dirampas untuk Negara yang ditempatkan pada Sub Rek Efek Client ID: KPK, KSEI No: CC001RT0500169, dan SID No: OTD2712P0069253 pada PT Mandiri Sekuritas. Rincian atas rekening pemerintah tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 16**.

F.10. Uang Pengganti Terpidana Yang Disetor Ke Kas Daerah

Pada tahun 2025 tidak terdapat putusan *inkracht* atas uang pengganti yang harus disetor ke kas daerah.

F.11. Kewajiban Kontingensi

Pada tahun 2025 terdapat gugatan hukum oleh pihak ketiga terhadap kasus korupsi yang ditangani oleh KPK. Adapun rinciannya dapat dilihat pada **Lampiran 17.**

F.12. Benda Sitaan Bernilai Ekonomis Yang Belum Berkekuatan Hukum Tetap

Sampai dengan tahun 2025 terdapat barang sitaan atau barang bukti bernilai ekonomis yang belum berkekuatan hukum tetap dari berbagai perkara kasus korupsi yang dapat diklasifikasikan sebagai aset. Adapun jenis barang sitaan yang dikelola KPK dapat dilihat pada **Lampiran 18.**

F.13. Barang Sita Eksekusi

Sampai dengan tahun 2025 Terdapat barang sita eksekusi yang perkaranya telah inkracht yang belum disajikan pada akun Persediaan Neraca KPK per 31 Desember 2025 karena belum dilakukan penilaian. Rincian barang tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 19.**

F.14. Barang Rampasan yang Berada Di Luar Negeri

Di dalam saldo persediaan per 31 Desember 2025, terdapat barang rampasan di luar negeri berupa satu unit apartemen berlokasi di *Apartemen Marine Parade Road Silversea level 09 Plot/Unit 09 House/Block 48 Singapore* dari kasus TPK terpidana Sdr. EmS tahun 2019 yang telah inkracht pada tahun 2021 dengan Putusan MARI Nomor 4792K/Pid.Sus/2020 tanggal 23 September 2020 dan telah tercatat dalam Persediaan senilai Rp38.099.933.000,00. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, persetujuan eksekusi barang rampasan tersebut masih dalam proses di otoritas Singapura (*Attorney General Chambers* (AGC)).

F.15. Pengembalian Uang Djoko Susilo

Terhadap perkara Djoko Susilo, KPK telah melakukan eksekusi sebesar Rp137.972.778.750,00 dengan rincian: lelang barang Rampasan sebesar Rp1.763.342.000,00, Hibah/PSP sebesar Rp128.260.002.000,00, Penyetoran uang Rampasan sebesar Rp7.949.434.750,00.

Mengacu pada Putusan MA RI Nomor 97 PK/Pid.Sus/2021 tanggal 6 Mei 2021 uang pengganti yang harus dibayar oleh Djoko Susilo sebesar Rp32.000.000.000,00 sehingga terdapat kelebihan (lebih bayar/setor ke Kas Negara) sejumlah Rp105.972.778.750,00 (seratus lima miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Terhadap hal ini, Pimpinan KPK telah meminta kepada Menteri Keuangan untuk dapat membayarkan kelebihan eksekusi dimaksud sesuai Surat Pimpinan KPK Nomor B-7256/Eks.00.01/01-26/10/2025 perihal Pelaksanaan Putusan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2021 tanggal 6 Mei 2021 atas nama Terpidana Inspektur Jenderal Polisi Dr. Djoko Susilo, S.H., M.Si sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku dan tidak mengembalikan barang rampasan yang telah laku lelang serta PSP/Hibah.

F.16. Capaian Output untuk masing-masing Rincian Output (RO)

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, pada Komisi Pemberantasan Korupsi terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) ke-7 yaitu pada Prioritas Nasional Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (PN VII).

Pagu Anggaran untuk seluruh rincian output di KPK adalah Rp1.464.548.473.000,00 dan total realisasi sebesar Rp1.387.864.616.458,00 setelah memperhitungkan pengembalian belanja sebesar Rp858.410.515. Rincian ini dapat dilihat pada Tabel 51.

Tabel 51 Capaian Output untuk masing-masing Rincian Output (RO)

Kementerian : (093) **Komisi Pemberantasan Korupsi**
Fungsi : (03) **Ketertiban dan Keamanan**
Sub Fungsi : (03.03) **Pembinaan Hukum**
**RO Prioritas Nasional ditandai dengan warna peach*

Kode	Kegiatan	Belanja			Output				
		Anggaran	Realisasi	%	Target RVRO	Realisasi VRO	Satuan	%	PCRO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BC	**Pencegahan dan Penindakan Perkara Korupsi**								
3843	**Koordinasi dan Supervisi Pemberantasan Korupsi**								
BIC.001	Koordinasi dan Supervisi Penanganan Tipikor Wilayah I	1.547.725.000	858.875.276	55,49%	5	5	Laporan	100,00%	100%
BIC.002	Koordinasi dan Supervisi Penanganan Tipikor Wilayah II	882.511.000	241.625.452	27,38%	5	5	Laporan	100,00%	100%
BIC.003	Koordinasi dan Supervisi Penanganan Tipikor Wilayah III	1.432.906.000	368.778.824	25,74%	5	5	Laporan	100,00%	100%
BIC.004	Koordinasi dan Supervisi Penanganan Tipikor Wilayah IV	2.076.766.000	917.508.651	44,18%	5	5	Laporan	100,00%	100%
BIC.005	Koordinasi dan Supervisi Penanganan Tipikor Wilayah V	2.489.837.000	1.079.862.565	43,37%	5	5	Laporan	100,00%	100%
BIC.006	Perbaikan Nilai Indeks Integritas Nasional Pemerintah Daerah di Wilayah I	2.057.690.000	987.758.865	48,00%	5	5	Laporan	100,00%	100%
BIC.007	Perbaikan Nilai Indeks Integritas Nasional Pemerintah Daerah di Wilayah II	1.351.162.000	614.087.729	45,45%	5	5	Laporan	100,00%	100%
BIC.008	Perbaikan Nilai Indeks Integritas Nasional Pemerintah Daerah di Wilayah III	1.619.004.000	739.411.803	45,67%	5	5	Laporan	100,00%	100%
BIC.009	Perbaikan Nilai Indeks Integritas Nasional Pemerintah Daerah di Wilayah IV	4.091.214.000	3.079.901.751	75,28%	5	5	Laporan	100,00%	100%
BIC.010	Perbaikan Nilai Indeks Integritas Nasional Pemerintah Daerah di Wilayah V	3.068.809.000	1.304.247.864	42,50%	5	5	Laporan	100,00%	100%
3845	**Pengelolaan LHKPN**								
BIB.001	Pendaftaran LHKPN	1.987.389.000	1.487.842.431	74,86%	400.000	402.906	Orang	100,73%	100%
BIB.002	Hasil Analisis Pemeriksaan LHKPN	334.937.000	156.437.298	46,71%	300	681	Laporan	227,00%	100%
3846	**Pengelolaan Gratifikasi dan Pemantauan Layanan Publik Pemerintahan**								
BKC.001	Ketetapan Status Gratifikasi	295.525.000	289.273.913	97,88%	1.300	1.924	Laporan	148,00%	100%
BKC.002	Hasil Pemeriksaan dan Deteksi Gratifikasi	8.474.000	5.054.300	59,64%	8	8	Laporan	100,00%	100%
BKC.003	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pengendalian Gratifikasi	463.528.000	127.271.334	27,46%	85	110	Laporan	129,41%	100%
BKC.004	Rekomendasi Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Publik	704.784.000	699.418.127	99,24%	30	44	Laporan	146,67%	100%
QKC.001	**Peta Kerawanan Praktik Gratifikasi dalam Penyelenggaraan Negara dan Layanan Publik**	**2.576.547.000**	**1.693.164.925**	**65,71%**	**1**	**1**	**Laporan**	**100,00%**	**100%**
3850	**Pengelolaan Data dan Pengembangan Teknologi Informasi**								
CAN.001	Pengembangan Sarana Infrastruktur TIK Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	49.089.649.000	47.619.235.746	97,00%	20	20	Unit	100,00%	100%
UAB.001	**Perancangan Pusat Data Analitik Pemberantasan Korupsi**	**3.568.640.000**	**3.013.472.319**	**84,44%**	**1**	**1**	**istem Informas**	**100,00%**	**100%**
3851	**Pengembangan dan Pemanfaatan Jaringan Kerja Sama Antara Lembaga/ Instansi (PJKAKI)**								
AEC.001	Pengembangan dan Pembinaan Jaringan Kerja Pemberantasan Korupsi	3.779.083.000	2.736.811.380	72,42%	12	12	Kegiatan	100,00%	100%
PBD.001	**Kebijakan implementasi UNCAC di Indonesia**	**3.000.000.000**	**1.872.458.974**	**62,42%**	**1**	**1**	**Rekomendasi**	**100,00%**	**100%**
3855	**Penanganan Laporan dan Pengaduan Masyarakat**								
BIF.001	Penanganan Pengaduan Masyarakat sebagai Bahan Penindakan dan Pencegahan TPK	2.168.109.000	1.785.842.651	82,37%	88	68	Laporan	77,27%	83%
BIF.002	Laporan Pembangunan dan Implementasi WBSTPK Terintegrasi	790.302.000	202.943.926	25,68%	64	64	Laporan	100,00%	100%
6564	**Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi**								
BDC.001	Sosialisasi dan Kampanye Nilai Antikorupsi	5.747.650.000	4.947.405.395	86,08%	12.289.980	12.289.980	Orang	100,00%	100%
6565	**Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi**								
BDC.001	Pemberdayaan dan Pelibatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi	3.378.460.000	2.218.406.538	65,66%	4.795	4795	Orang	100,00%	100%
BDC.002	Peningkatan Kapabilitas dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kota/Kabupaten Antikorupsi dan Penyelenggara Negara	2.311.111.000	1.135.670.329	49,14%	3.831	3831	Orang	100,00%	100%

Kode	Kegiatan	Belanja			Output				
		Anggaran	Realisasi	%	Target RVRO	Realisasi VRO	Satuan	%	PCRO
6566	**Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi**								
ADI.001	Pengelolaan Sertifikasi Profesi dan Kompetensi Antikorupsi	941.660.000	602.845.383	64,02%	800	1098	Orang	137,25%	100%
ADIU.01	Sertifikasi Profesi dan Kompetensi Antikorupsi	2.500.000.000	1.708.250.852	68,33%	800	1098	Orang	137,25%	100%
PDI.001	**Pelatihan Penguatan Integritas untuk Masyarakat Umum, Badan Usaha dan Legislatif**	**2.000.000.000**	**1.159.869.314**	**57,99%**	**500**	**546**	**Orang**	**109,20%**	**100%**
UAC.001	**Pelatihan Integritas ASN**	**5.500.000.000**	**4.027.828.331**	**73,23%**	**1.000**	**1.292**	**Orang**	**129,20%**	**100%**
6567	**Pemantauan dan Kajian terhadap Kebijakan dan Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Perspektif Antikorupsi**								
BKC.001	Rekomendasi Kebijakan Pencegahan Korupsi	1.522.533.000	981.638.489	64,47%	6	6	Laporan	100,00%	100%
BKC.002	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Kebijakan	434.289.000	147.659.439	34,00%	6	6	Laporan	100,00%	100%
BKC.003	Indeks Integritas Nasional	37.466.669.000	36.661.132.939	97,85%	1	1	Laporan	100,00%	100%
BKC.004	Monitoring Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi	7.343.948.000	6.277.055.456	85,47%	2	2	Laporan	100,00%	100%
6568	**Anti Korupsi pada Badan Usaha**								
BKC.001	Penggalian Isu Korupsi pada Sektor Usaha	1.027.376.000	391.755.588	38,13%	30	30	Laporan	100,00%	100%
BKC.002	Penyelesaian Isu Korupsi pada Sektor Usaha	200.867.000	35.660.000	17,75%	20	20	Laporan	100,00%	100%
6569	**Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada Setiap Jejaring Pendidikan**								
BDB.001	Pemberantasan Korupsi melalui Pendidikan Antikorupsi	2.205.387.000	1.394.539.876	63,23%	17.471	17.496	Lembaga	100,14%	100%
FAE.001	Survei Penilaian Integritas Pendidikan	1.334.758.000	937.938.698	70,27%	1	1	Laporan	100,00%	100%
QDB.001	**Penyelenggaraan Program Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Jenjang Dasar, Menengah, Tinggi,**	**2.000.703.000**	**1.309.968.199**	**65,48%**	**78**	**105**	**Lembaga**	**134,62%**	**100,00%**
6570	**Deteksi dan Analisis Anti Korupsi**								
BKA.001	Pengumpulan dan Analisis Informasi untuk Kepentingan Pemberantasan Tipikor	3.971.591.000	2.893.181.733	72,85%	48	48	Laporan	100,00%	100%
6991	**Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi**								
BCE.001	Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi yang dilimpahkan ke tahap penyidikan	15.855.756.000	10.227.624.636	64,50%	120	120	Perkara	100,00%	100%
BCE.002	Perkara Penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang dilimpahkan ke tahap Penuntutan	29.490.548.000	17.898.308.685	60,69%	110	110	Perkara	100,00%	100%
BCE.003	Perkara Penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang dilimpahkan ke tahap Persidangan	26.713.739.000	16.167.149.817	60,52%	110	110	Perkara	100,00%	100%
BCE.004	Eksekusi Pidana Badan Tindak Pidana Korupsi yang Berkekuatan Hukum Tetap	2.342.728.000	1.554.697.702	66,36%	120	120	Perkara	100,00%	100%
BCE.005	Pemulihan aset hasil Tindak Pidana Korupsi (Asset recovery)	14.882.176.000	10.937.856.023	73,50%	120	120	Perkara	100,00%	100%
WA	**Dukungan Manajemen**								
3834	**Perancangan Hukum, Litigasi dan Bantuan Hukum**								
EBA.957	Layanan Hukum	325.550.000	50.314.629	15,46%	1	1	Dokumen	100,00%	100%
EBA.969	Layanan Bantuan Hukum	809.835.000	528.704.412	65,29%	1	1	Layanan	100,00%	100%
PBD.001	**Rekomendasi Kebijakan terhadap Rancangan undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**	**500.000.000**	**315.622.305**	**63,12%**	**1**	**1**	**Rekomendasi Kebijakan**	**100,00%**	**100%**
3835	**Penyelenggaraan Humas**								
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	3.228.960.000	2.910.475.241	90,14%	1	1	Layanan	100,00%	100%
3836	**Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan**								
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	293.847.000	34.909.222	11,88%	1	1	Layanan	100,00%	100%
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	33.196.000	7.603.024	22,90%	1	1	Layanan	100,00%	100%
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	23.027.000	13.843.535	60,12%	1	1	Layanan	100,00%	100%
3837	**Manajemen Sumber Daya Manusia**								
EBA.994	Layanan Perkantoran	1.051.586.681.000	1.048.118.621.731	99,67%	2	2	Layanan	100,00%	100%
EBC.954	Layanan Manajemen SDM	3.050.122.000	2.094.032.934	68,65%	1	1	Layanan	100,00%	100%
EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	5.705.992.000	4.805.823.408	84,22%	2.000	2.000	Orang	100,00%	100%
3838	**Penyelenggaraan Operasional Perkantoran (KPK)**								
EBA.962	Layanan Umum	21.384.103.000	19.893.449.542	93,03%	1	1	Layanan	100,00%	100%
EBA.963	Layanan Data dan Informasi	48.907.743.000	47.078.202.055	96,26%	1	1	Layanan	100,00%	100%
EBA.994	Layanan Perkantoran	54.798.901.000	53.877.569.602	98,32%	1	1	Layanan	100,00%	100%
EBB.951	Layanan Sarana Internal	2.700.783.000	2.591.596.027	95,96%	1.327	1.327	Unit	100,00%	100%
EBB.971	Layanan Prasarana Internal	2.057.316.000	2.013.547.643	97,87%	13	13	Unit	100,00%	100%
EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	4.579.499.000	4.268.539.406	93,21%	4	4	Layanan	100,00%	100%

Kode	Kegiatan	Belanja			Output				
		Anggaran	Realisasi	%	Target RVRO	Realisasi VRO	Satuan	%	PCRO
5645	**Penyelenggaraan Dukungan Internal Kesekretariatan**								
EBA.001	Layanan Kesekretariatan Pimpinan KPK	3.287.029.000	2.252.615.313	68,53%	1	1	Layanan	100,00%	100%
EBA.002	Layanan Kesekretariatan Dewan Pengawas KPK	1.113.877.000	721.357.593	64,76%	1	1	Laporan	100,00%	100%
EBA.003	Layanan Kesekretariatan Deputi Penindakan dan Eksekusi	125.407.000	31.295.865	24,96%	1	1	Layanan	100,00%	100%
EBA.004	Layanan Kesekretariatan Deputi Pencegahan dan Monitoring	91.188.000	38.593.977	42,32%	1	1	Layanan	100,00%	100%
EBA.005	Layanan Kesekretariatan Deputi Informasi dan Data	141.119.000	77.386.183	54,84%	1	1	Layanan	100,00%	100%
EBA.007	Layanan Kesekretariatan Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat	142.536.000	39.139.297	27,46%	1	1	Layanan	100,00%	100%
EBA.008	Layanan Kesekretariatan Deputi Koordinasi dan Supervisi	184.307.000	128.849.386	69,91%	1	1	Layanan	100,00%	100%
6563	**Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi**								
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	157.108.000	62.294.467	39,65%	3	3	Layanan	100,00%	100%
EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	386.169.000	271.351.576	70,27%	4	4	Layanan	100,00%	100%
6992	**Pengawasan Internal KPK**								
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	146.869.000	29.184.720	19,87%	4	4	Layanan	100,00%	100%
EBD.965	Layanan Audit Internal	230.769.000	113.084.408	49,00%	6	6	Layanan	100,00%	100%
Subtotal		**1.464.548.473.000**	**1.387.864.616.458**						

Jakarta, 8 Mei 2026
Pimpinan,

Setyo Budiyanto
Ketua